



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**



JL. HADJI BOEJASIN NO.9 PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP), setiap akhir tahun Pemerintahan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan prinsip – prinsip penyusunan Laporan Keuangan yang berlaku umum.

Dinas Kesehatan adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya menyajikan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19740612 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

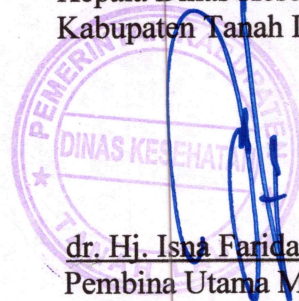
Jalan H. Boejasin No. 9 Pelaihari Telp. (0512) 21098

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19740612 200501 2 016



BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.841,37 Km² atau 10,34% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023) dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 Km², Kecamatan Jorong dengan luas 697,84 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 419,05 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 68,70 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 364.117 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 103,31 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 1.156 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 530 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 455 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 67,12% dan 2,49% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 42,48% disusul sektor perdagangan sebesar 20,60% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mencapai 13,52%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2024 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan tegal/kebun menurut jenis penggunaannya seluas 36,521 Ha, lading/huma seluas 12.630 Ha serta lahan sementara tidak diusahakan 9.436,64 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 16.408 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2024 mencapai 12.692 Ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2024 sebesar 14.852 Ha.



SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebesar 125.644,11 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.688,39 Ha, kawasan hutan produksi 70.157,61 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.157,61 Ha dan kawasan tubuh air 435,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.652,44 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.173,04 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2024 berkisar antara 32,50°C sampai 37,40°C, temperatur minimum berkisar antara 18,80°C sampai 22,80°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,40°C sampai 28,80°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 4,50 mm sampai 564,60 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan November hingga Mei, meskipun beberapa waktu ke belakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi empat belas kali pergantian jabatan bupati. Pada Tahun 2024 Tanah Laut dipimpin oleh Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan wakilnya H. Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 dan berakhir pada tanggal 19 September 2024, yang kemudian digantikan oleh Penjabat Bupati Tanah Laut yaitu Ir. Syamsir Rahman, MS. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dimana terjadi perubahan pada SKPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.



Kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana terjadi perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi Inspektorat Kabupaten, serta kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula dihapus kemudian disisipkan kembali dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Pariwisata;
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 23) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



- 24) Badan Pendapatan Daerah;
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 30) Kecamatan Pelaihari;
- 31) Kecamatan Tambang Ulang;
- 32) Kecamatan Kurau;
- 33) Kecamatan Bati Bati;
- 34) Kecamatan Batu Ampar;
- 35) Kecamatan Panyipatan;
- 36) Kecamatan Takisung;
- 37) Kecamatan Jorong;
- 38) Kecamatan Kintap;
- 39) Kecamatan Bajuin;
- 40) Kecamatan Bumi Makmur.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pola tata kelola di 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada UPT Puskesmas Asam-Asam, UPT Puskesmas Batakan, UPT Puskesmas Bumi Makmur, UPT Puskesmas Jorong, UPT Puskesmas Kait-Kait, UPT Puskesmas Kintap, UPT Puskesmas Padang Luas, UPT Puskesmas Panyipatan, UPT Puskesmas Pelaihari, UPT Puskesmas Sungai Cuka, UPT Puskesmas Sungai Riam, UPT Puskesmas Tambang Ulang, UPT Puskesmas Takisung, UPT Puskesmas Tanjung Habulu, UPT Puskesmas Tirta Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 namun efektif pada tanggal 1 April 2021. Pada tahun 2023 terdapat lagi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2023 tentang Penetapan 2 (dua) unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan 1 (satu) unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 14 Januari 2022, yaitu UPT Puskesmas Bentok Kampung, UPT Puskesmas Durian Bungkok dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Gambaran Umum Dinas Kesehatan

1. Struktur Organisasi

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif)
- b. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah



Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut.

1. Sekretariat terdiri dari.
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari.
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. UPT Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020 memiliki 40 (empat puluh) perangkat daerah dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) unit kerja perangkat daerah. Serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat



Kesehatan Masyarakat Panggung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Dalam tabel dibawah ini disampaikan secara terperinci jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1.1 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan

| No | Perangkat Daerah |
|----|------------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan |
| 2 | RSUD H. Boejasin Pelaihari |
| 3 | RSUD KH. Mansyur Kintap |
| 4 | UPT Instalasi Farmasi |
| 5 | UPT Laboratorium Kesehatan |
| 6 | UPT Puskesmas Pelaihari |
| 7 | UPT Puskesmas Asam-Asam |
| 8 | UPT Puskesmas Batakan |
| 9 | UPT Puskesmas Bati-Bati |
| 10 | UPT Puskesmas Jorong |
| 11 | UPT Puskesmas Kait-Kait |
| 12 | UPT Puskesmas Kintap |
| 13 | UPT Puskesmas Kurau |
| 14 | UPT Puskesmas Padang Luas |
| 15 | UPT Puskesmas Panyipatan |
| 16 | UPT Puskesmas Sungai Cuka |
| 17 | UPT Puskesmas Sungai Riam |
| 18 | UPT Puskesmas Tajau Pecah |
| 19 | UPT Puskesmas Takisung |
| 20 | UPT Puskesmas Tambang Ulang |
| 21 | UPT Puskesmas Tanjung Habulu |
| 22 | UPT Puskesmas Tirtajaya |
| 23 | UPT Puskesmas Angsau |
| 24 | UPT Puskesmas Bumi Makmur |
| 25 | UPT Puskesmas Bentok Kampung |
| 26 | UPT Puskesmas Durian Bungkok |
| 27 | UPT Puskesmas Panggung |

Sumber : Umpeg dan Kepegawaian 2023

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 24) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| PENDAHULUAN | |
|-------------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah |
| BAB II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |
| | 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| | 2.2 Kebijakan keuangan |
| | 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| BAB III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB IV | Kebijakan akuntansi |
| | 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah |
| | 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah |
| | 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu |
| BAB V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah |
| | 5.1.1 Pendapatan-LRA |
| | 5.1.2 Belanja |
| | 5.1.3 Pembiayaan |
| | 5.1.4 Pendapatan-LO |
| | 5.1.5 Beban |
| | 5.1.6 Aset |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| PENDAHULUAN | |
|--------------------|--|
| | 5.1.7 Kewajiban 5.1.8 Ekuitas Dana |
| BAB VI | 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| BAB VII | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah |
| | Penutup |

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,73%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,58%.
- 3) Gini Ratio sebesar 0,26%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,98%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,78%;
- 6) Tingkat Inflasi sebesar 2,43%;
- 7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp20.165,71.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut

| No. | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|-----------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Kab/Kota (%) | 3,86 | 3,73 | (0,13) |
| 2 | Kab/Kota (Ribu Orang) | 13,54 | 13,22 | (0,32) |
| 3 | Provinsi (%) | 4,49 | 4,29 | 0,20 |
| 4 | Nasional (%) | 9,57 | 9,36 | 0,21 |
| 5 | Peringkat Provinsi | 11,00 | 33,00 | turun |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|--------------------|------------|------------|----------------|
| 6 | Peringkat Nasional | 409,00 | 528,00 | turun |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 sebesar 3,73% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,13% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota | 0,37 | 0,30 | (0,07) |
| 2 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi | 0,63 | 0,61 | (0,02) |
| 3 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional | 1,56 | 1,53 | (0,03) |
| 4 | Peringkat Provinsi | 9,00 | 33,00 | turun |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota | 0,06 | 0,07 | 0,01 |
| 2 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi | 0,15 | 0,16 | 0,01 |
| 3 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 11,00 | 29,00 | turun |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 3,58%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|---|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) | 4,17 | 3,58 | (0,59) |
| 2 | Tingkat Pengangguran Provinsi (%) | 4,74 | 4,31 | (0,43) |
| 3 | Tingkat Pengangguran Nasional (%) | 5,90 | 5,32 | 0,58 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 17,00 | 22,00 | turun |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,58%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,17%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini atau Gini *Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

| No. | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|--------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Kab/ Kota | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 2 | Tingkat Provinsi | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 3 | Tingkat Nasional | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 11 | 26 | turun |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini masih sama jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60)
- 2) Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (> 80)



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 72,98 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut

| No. | IPM (Tingkat) | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|--------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Kabupaten/Kota | 70,35 | 72,98 | 2,63 |
| 2 | Provinsi | 71,84 | 74,66 | 2,82 |
| 3 | Indonesia/Nasional | 72,91 | 74,39 | 0,62 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 7,00 | 9,00 | turun |
| 5 | Peringkat Nasional | 251,00 | 251,00 | tetap |

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 72,98 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,35 poin mengalami kenaikan sebesar 2,63 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 9 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 251 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 21 dari 34 Provinsi di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

| No. | IPM (Tingkat) | Kabupaten/Kota | | Provinsi Tahun 2024 | Nasional Tahun 2024 |
|-----|--|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
| 1 | PDRB Menurut Jenis Pengeluaran (harga konstan 2010) (Rp) | 11.056.020,00 | 11.584.220,00 | 149.230.963,17 | 12.439.449.618,31 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,12 | 4,78 | 4,84 | 5,05 |
| 3 | Peringkat Provinsi | 6 | 6 | 21 | 0,00 |

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 4,78%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten

Tanah Laut menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (*hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 2,43% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Naik/Turun (%) |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut (%) | 6,98 (Banjarmasin) | 2,43 (Banjarmasin) | (4,47) |
| 2 | Tingkat Inflasi Provinsi (%) | 6,99 | 2,43 | (4,47) |
| 3 | Tingkat inflasi Nasional (%) | 5,51 | 2,61 | (2,90) |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,43%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,98%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut sama dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | 2.962,56 | 3.099,64 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6.523,43 | 6.672,86 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.997,87 | 2.136,29 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 16,69 | 18,30 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 30,30 | 32,32 |
| 6 | Konstruksi | 1.211,29 | 1.347,69 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|---|------------|------------|
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.986,70 | 2.124,47 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1.054,81 | 1.248,08 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 254,80 | 284,27 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 513,58 | 548,09 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 235,49 | 254,06 |
| 12 | <i>Real Estate</i> | 327,41 | 358,99 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 59,16 | 66,51 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 882,21 | 949,24 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 643,16 | 671,31 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 192,62 | 210,81 |
| 17 | Jasa Lainnya | 127,10 | 142,80 |
| 18 | Produk Domestik Bruto | 19.019,18 | 20.165,71 |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
 1. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 2. Dana Insentif Daerah
 3. Dana Otonomi Khusus
 4. Dana Keistimewaan
 5. Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 2. Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:
 - a. Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana Darurat;

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2024 meliputi:

- 1) Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;
- 2) Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

- 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial;
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Terkait dengan adanya sub kegiatan yang sifatnya *close list*, maka saat ini masih dilakukan pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sambil menunggu hasil pemutakhiran maka beberapa sub kegiatan yang belum bisa dicantumkan dalam PPAS untuk sementara indikator dan alokasi dananya disematkan ke sub kegiatan yang sudah ada, untuk kemudian disesuaikan dan dimasukkan dalam kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau



kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2024, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut.

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan

pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2024 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

2.2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode Akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

setara kas selama satu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 122.775.808.163,00 dan anggaran belanja sebesar Rp 410.219.731.899,00.

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 12 Oktober 2024 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 100.260.140.719,00 dan anggaran belanja sebesar Rp 459.181.138.752,47

Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 99.147.099.694,38 dan belanja sebesar Rp 421.005.183.260,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan hampir tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebesar 98,89 %, hal ini disebabkan pendapatan di beberapa UPT BLUD belum mencapai target karena adanya pengurangan kepesertaan JKN dan adanya pengembalian pendapatan dari jasa Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bahwa tingkat serapan anggaran TA 2024 mencapai 91,69 %, hal ini cukup menggembarakan dalam hal persentasenya dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan akan tetapi secara fisik semua kegiatan yang direncanakan sudah direalisasikan kecuali Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana karena tidak ada bencana yang terjadi pada Tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

4.1 IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2024 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023.

4.2 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- 1) Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- 2) Basis Akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA / LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan asas:

- 1) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 AKUNTANSI BELANJA - BEBAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debit Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi;
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

4.4.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran);
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4.4 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos di luar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- 4) Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.4.6 AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 10 Penyisihan Piutang

| No. | Umur Piutang | Kategori | Penyisihan Piutang (%) |
|-----|--------------|---------------|------------------------|
| 1 | 0 < 1 Tahun | Lancar | 0,50 |
| 2 | 1 – 2 Tahun | Kurang Lancar | 30 |



| No. | Umur Piutang | Kategori | Penyisihan Piutang (%) |
|-----|--------------|-----------|------------------------|
| 3 | >2 -3 Tahun | Diragukan | 50 |
| 4 | >3 Tahun | Macet | 100 |

4.4.7 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:
2. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
3. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
4. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

4.4.8 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 11 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen

| No. | Umur Dana Bergulir | Kategori | Penyisihan Dana Bergulir (%) |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 0 – 4 tahun | Lancar | 0 |
| 2 | > 4 – 5 tahun | Ragu Tertagih | 50 |
| 3 | > 5 tahun | Macet | 100 |

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menanganinya.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset

4.4.9 AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;
- 2) aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan *overhaul* pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan *overhaul* yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud;
- 5) Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

4.4.10 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.11 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.12 AKUNTANSI EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 81.951.620.838,08 |

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 81.951.620.838,08 |

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 12 Pendapatan Asli Daerah

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|-----|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 98,89 | 81.951.620.838,08 | 20.98 |
| | Jumlah | 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 98,89 | 81.951.620.838,08 | 20.98 |

5.1.1.1.1 RETRIBUSI DAERAH

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 78.932.426.502,00 | 79.695.108.248,78 | 166.500.000,00 |

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024.

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut meliputi retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum adalah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp79.695.108.248,78 yang terbagi dua menjadi retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp 2.267.233.937,00 dan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebesar Rp 77.185.119.398,00. Retribusi jasa usaha sebesar Rp **242.754.913,78**, meliputi retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp 85.316.000,00, retribusi penyewaan bangunan Rp 148.750.000,00, retribusi pemakaian laboratorium Rp 2.388.913,78, dan retribusi pemakaian ruangan Rp 6.300.000,00. Sedangkan untuk TA 2023 realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berupa retribusi jasa usaha yaitu penyewaan bangunan dan pemakaian ruangan sebesar Rp166.500.000,00

Tabel 13 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| A | Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 1.985.451.400,00 | 2.267.233.937,00 | 114,19 | 0,00 | |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 76.763.651.102,00 | 77.185.119.398,00 | 100,55 | 0,00 | |
| | Jumlah | 78.749.102.502,00 | 79.452.353.335,00 | 100,89 | 0,00 | |
| B | Retribusi Jasa Usaha | | | | | |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | |
| 1 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 39.224.000,00 | 85.316.000,00 | 217,51 | 0,00 | |
| 2 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 139.500.000,00 | 148.750.000,00 | 106,63 | 165.000.000,00 (9,85) | |
| 3 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 1.600.000,00 | 2.388.913,78 | 149,31 | 0,00 | |
| 4 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 3.000.000,00 | 6.300.000,00 | 210,00 | 1.500.000,00 320 | |
| | Jumlah | 183.324.000,00 | 242.754.913,78 | 132,42 | 166.500.000,00 45,8 | |
| | Jumlah Total | 78.932.426.502,00 | 79.695.108.248,78 | 100,97 | 166.500.000,00 47.764,93 | |

Pendapatan Retribusi sebesar Rp79.695.108.248,78 ini terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp79.452.353.335,00 dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp242.754.913,78. Pendapatan retribusi daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 79.528.608.248,78 atau 47.764,93 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi pendapatan retribusi daerah yang sangat tinggi ini disebabkan oleh beralihnya rekening pendapatan dari jasa layanan umum BLUD yang pada TA 2023 berada



pada rekening Pendapatan lain-lain yang sah, pada TA 2024 dialihkan ke rekening retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan adanya Perda Retribusi Daerah No 1 Tahun 2024.

5.1.1.1.2 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21.327.714.217,00 | 19.452.741.446,56 | 81.785.120.838,08 |

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berasal dari pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD yaitu pendapatan dari dua RSUD, 22 puskesmas dan satu UPT Laboratorium Kesehatan. Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.452.741.446,56 dan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp81.785.120.838,08 terdiri atas:

Tabel 14 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Pendapatan dari Pengembalian | 500.000,00 | 328.500,00 | 65,70 | 0,00 | |
| | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 500.000,00 | 328.500,00 | 65,70 | 0,00 | |
| 2 | Pendapatan BLUD | 21.327.214.217,00 | 19.452.412.946,56 | 91,21 | 81.785.120.838,08 | (76,22) |
| | Pendapatan BLUD dari jasa layanan | 20.280.247.548,00 | 18.379.114.817,00 | 90,63 | 80.033.614.581,95 | (77,04) |
| | Pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain | 200.415.471,00 | 206.332.000,00 | 102,95 | 519.300.826,40 | (60,27) |
| | Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah | 846.551.198,00 | 866.966.129,56 | 102,41 | 1.228.837.174,67 | (29,45) |
| | Jumlah | 21.327.714.217,00 | 19.452.741.446,56 | 91,21 | 81.785.120.838,08 | (76,21) |

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada TA 2024 ini mengalami penurunan sebesar Rp 62.332.379.391,52 atau 76,21 % dari tahun sebelumnya. Penurunan Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini yang paling dominan disebabkan oleh beralihnya rekening pendapatan dari jasa layanan umum BLUD yang pada TA 2023 berada pada rekening Pendapatan lain-lain yang sah, pada TA 2024



dialihkan ke rekening retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan adanya Perda Retribusi Daerah No 1 Tahun 2024.

5.1.2 BELANJA

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 459.181.138.752,47 | 420.833.206.771,00 | 371.357.293.217,00 |

Belanja adalah semua transaksi pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 376.258.772.497,00 | 347.202.814.954,00 | 298.857.468.222,00 |

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Akuntansi Belanja Dan Beban sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Tabel 15 Rincian Belanja Operasi

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Pegawai | 131.232.928.695,00 | 126.418.953.134,00 | 96,33 | 111.289.348.709,00 | |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 244.349.743.802,00 | 220.224.029.705,00 | 90,13 | 187.111.500.931,00 | 17,70 |
| 3 | Belanja Hibah | 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 82,80 | 456.618.582,00 | |
| | Jumlah | 376.258.772.497,00 | 347.202.814.954,00 | 92,32 | 298.857.468.222,00 | 16,23 |

Realisasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 48.517.323.221,00 atau sebesar 16,23 % dari tahun sebelumnya.

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 131.232.928.695,00 | 126.418.953.134,00 | 111.289.348.709,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp126.418.953.134,00 dan Rp **111.289.348.709,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Belanja Pegawai

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 74.732.337.095,00 | 72.536.052.828,00 | 97,06 | 64.107.245.299,00 | |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 47.461.410.894,00 | 45.467.255.230,00 | 95,80 | 40.933.203.410,00 | 11,08 |
| 3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 1.258.606.306,00 | 941.035.076,00 | 74,77 | 0,00 | |
| 4 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.251.720.706,00 | 935.620.076,00 | 74,75 | 0,00 | |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.174.400,00 | 1.710.000,00 | 78,64 | 0,00 | |
| 6 | Belanja Pegawai BLUD | 7.778.400.000,00 | 7.472.900.000,00 | 96,07 | 6.248.900.000,00 | 19,59 |
| Jumlah | | 131.232.928.695,00 | 126.418.953.134,00 | 96,33 | 111.289.348.709,00 | 13,64 |

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.185.313.029,00 atau sebesar 13,64 % dari tahun sebelumnya.

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 244.349.743.802,00 | 220.224.029.705,00 | 187.111.500.931,00 |

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp220.224.029.705,00 dan Rp187.111.500.931,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17 Belanja Barang dan Jasa

| No . | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|------|--|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Barang | 22.916.221.314,00 | 20.261.942.265,00 | 88,42 | 10.886.603.627,00 | 86,12 |
| 2 | Belanja Jasa | 94.035.362.742,00 | 85.604.506.658,00 | 91,03 | 86.357.819.900,00 | (0,87) |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 5.343.180.851,00 | 3.525.080.038,00 | 65,97 | 1.297.206.744,00 | 171,74 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.400.408.057,00 | 3.657.448.098,00 | 83,12 | 6.899.039.384,00 | (46,99) |
| 5 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 187.000.000,00 | 169.000.000,00 | 90,37 | 109.000.000,00 | 55,05 |
| 6 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 16.466.065.294,00 | 11.365.431.533,00 | 69,02 | 0,00 | |
| 7 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 101.001.505.544,00 | 95.640.621.113,00 | 94,69 | 81.561.831.276,00 | 17,26 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No . | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| Jumlah | | 244.349.743.802,00 | 220.224.029.705,00 | 90,13 | 187.111.500.931,00 | 17,70 |

Tabel 18 Rincian Belanja Barang dan Jasa

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 22.916.221.314,00 | 20.261.942.265,00 | 88,42 | 10.886.603.627,00 | 86,12 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 33.384.795.366,00 | 27.710.624.133,00 | 83,00 | 28.947.856.310,00 | (4,27) |
| 3 | Belanja Luran Jaminan/Asuransi | 58.657.587.076,00 | 56.224.626.888,00 | 95,85 | 56.650.269.470,00 | (0,75) |
| 4 | Belanja Sewa Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640.000,00 | (100) |
| 5 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 458.602.300,00 | 350.098.300,00 | 76,34 | 18.101.120,00 | 1834,13 |
| 6 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 61.800.000,00 | 51.200.000,00 | 82,85 | 14.200.000,00 | 250,56 |
| 7 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.443.000,00 | (100) |
| 8 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 234.950.000,00 | 213.290.000,00 | 90,78 | 0,00 | |
| 9 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.237.628.000,00 | 1.054.667.337,00 | 85,22 | 583.310.000,00 | 80,81 |
| 10 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | (100) |
| 11 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.023.543.800,00 | 892.512.185,00 | 44,11 | 559.985.900,00 | 59,38 |
| 12 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.253.337.051,00 | 2.632.567.853,00 | 80,92 | 684.620.844,00 | 284,53 |
| 13 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 66.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600.000,00 | (100) |
| 14 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.400.408.057,00 | 3.657.448.098,00 | 83,12 | 6.899.039.384,00 | (46,99) |
| 15 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 187.000.000,00 | 169.000.000,00 | 90,37 | 109.000.000,00 | 55,05 |
| 16 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 16.466.065.294,00 | 11.365.431.533,00 | 69,02 | 0,00 | |
| 17 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 101.001.505.544,00 | 95.640.621.113,00 | 94,69 | 81.561.831.276,00 | 17,26 |
| Jumlah | | 244.349.743.802,00 | 220.224.029.705,00 | 90,13 | 187.111.500.931,00 | 17,70 |



Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 33.112.528.774,00 atau sebesar 17,70% dari sebelumnya.

5.1.2.1.3 BELANJA HIBAH

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 |

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Belanja hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ditujukan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp **676.100.000,00** dan Rp **456.618.582,00** terdiri atas:

Tabel 19 Belanja Hibah

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Hibah kepada BUMD | 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 82,80 | 456.618.582,00 | |
| Jumlah | | 676.100.000,00 | 676.100.000,00 | 82,80 | 456.618.582,00 | |

Realisasi Belanja Hibah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 219.481.418,00 atau sebesar 48,07% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 53.297.811.166,00 , Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 13.420.890.502,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 6.620.190.149,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 291.500.000,00 Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Realisasi Belanja Modal 2024

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.957.355.816,47 | 53.297.811.166,00 | 90,40 | 63.374.334.977,00 | (15,9) |
| 2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.877.891.687,00 | 13.420.890.502,00 | 84,53 | 9.079.636.518,00 | 47,81 |
| 3 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 7.794.078.752,00 | 6.620.190.149,00 | 84,94 | 0,00 | |
| 4 | Belanja Modal Aset Lainnya | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 45.853.500,00 | 535,72 |
| JUMLAH | | 82.922.366.255,47 | 73.630.391.817,00 | 88,79 | 72.499.824.995,00 | 1,56 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 58.957.355.816,47 | 53.297.811.166,00 | 63.374.334.977,00 |

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp**53.297.811.166,00** dan Rp**63.374.334.977,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Belanja Modal Alat Besar | 1.443.000,00 | 1.300.000,00 | 90,09 | 272.000.000,00 | (99,52) |
| 2 | Belanja Modal Alat Angkutan | 4.900.116.140,96 | 4.292.120.000,00 | 87,59 | 1.316.440.000,00 | 226,04 |
| 3 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 92.161.020,00 | 91.200.000,00 | 98,96 | 0,00 | |
| 4 | Belanja Modal Alat Pertanian | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.980.064.101,00 | 6.503.584.976,00 | 93,17 | 2.877.357.853,00 | 126,03 |
| 6 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 6.273.286.825,00 | 6.069.066.000,00 | 96,74 | 3.585.500.000,00 | 69,27 |
| 7 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 31.065.222.590,51 | 29.764.043.544,00 | 95,81 | 53.857.154.288,00 | (44,74) |
| 8 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.708.518.989,00 | 2.097.030.700,00 | 77,42 | 960.360.936,00 | 118,36 |
| 9 | Belanja Modal Komputer | 674.711.734,00 | 612.639.324,00 | 90,80 | 505.521.900,00 | 21,19 |
| 10 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6.259.831.416,00 | 3.864.826.622,00 | 61,74 | 0,00 | |
| Jumlah | | 58.957.355.816,47 | 53.297.811.166,00 | 90,40 | 63.374.334.977,00 | (15,90) |

Tabel 22 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ Penuruna n |
|-----|--|------------------|------------------|--------|------------------|----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pengadaan Alat-alat Bantu | 1.443.000,00 | 1.300.000,00 | 90,09 | 272.000.000,00 | (99,52) |
| 2 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 4.900.116.140,96 | 4.292.120.000,00 | 87,59 | 1.316.440.000,00 | (226,04) |
| 3 | Pengadaan Alat Ukur | 92.161.020,00 | 91.200.000,00 | 98,96 | 0,00 | |
| 4 | Pengadaan Alat Pengolahan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5 | Pengadaan Alat Kantor | 476.855.096,00 | 439.919.680,00 | 92,25 | 2.649.343.482,00 | (83,40) |
| 6 | Pengadaan Alat Rumah Tangga | 6.503.209.005,00 | 6.063.665.296,00 | 93,24 | 228.014.371,00 | 2259,33 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ Penurunan % |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 7 | Pengadaan Alat Studio | 48.640.200,00 | 37.066.000,00 | 76,20 | 0,00 | |
| 8 | Pengadaan Alat Komunikasi | 3.330.000,00 | 3.000.000,00 | 90,09 | 0,00 | |
| 9 | Pengadaan Peralatan Pemancar | 6.221.316.625,00 | 6.029.000.000,00 | 96,91 | 3.585.500.000,00 | 68,15 |
| 10 | Pengadaan Alat Kedokteran | 30.178.231.972,51 | 28.901.267.254,00 | 95,77 | 22.513.573.806,00 | 28,37 |
| 11 | Pengadaan Alat Kesehatan Umum | 886.990.618,00 | 862.776.290,00 | 97,27 | 31.343.580.482,00 | (97,25) |
| 12 | Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 2.578.936.708,00 | 1.988.930.700,00 | 77,12 | 957.986.336,00 | 107,62 |
| 13 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 129.582.281,00 | 108.100.000,00 | 83,42 | 2.374.600,00 | 4452,35 |
| 14 | Pengadaan Komputer Unit | 572.562.846,00 | 526.876.824,00 | 92,02 | 447.400.000,00 | 17,76 |
| 15 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 102.148.888,00 | 85.762.500,00 | 83,96 | 58.121.900,00 | 47,56 |
| 16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6.259.831.416,00 | 3.864.826.622,00 | 61,74 | 0,00 | |
| Jumlah | | 58.957.355.816,47 | 53.297.811.166,00 | 90,40 | 63.374.334.977,00 | (15,90) |

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 10.076.523.811,00 atau sebesar 15,90 % dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>15.877.891.687,00</u> | <u>13.420.890.502,00</u> | <u>9.079.636.518,00</u> |

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp 13.420.890.502,00 dan Rp 9.079.636.518,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 13.604.937.435,00 | 11.533.232.888,00 | 84,77 | 8.733.226.457,00 | 32,06 |
| 2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.058.369.052,00 | 1.712.292.082,00 | 83,19 | 0,00 | |
| 3 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 214.585.200,00 | 175.365.532,00 | 81,72 | 346.410.061,00 | (49,38) |
| Jumlah | | 15.877.891.687,00 | 13.420.890.502,00 | 84,53 | 9.079.636.518,00 | 47,81 |



Tabel 24 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 13.604.937.435,00 | 11.533.232.888,00 | 84,77 | 8.733.226.457,00 | 32,06 |
| 2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.058.369.052,00 | 1.712.292.082,00 | 83,19 | 0,00 | |
| 3 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 214.585.200,00 | 175.365.532,00 | 81,72 | 346.410.061,00 | (49,38) |
| Jumlah | | 15.877.891.687,00 | 13.420.890.502,00 | 84.53 | 9.079.636.518,00 | 47,81 |

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.341.253.984,00 atau sebesar 47,81 % dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 7.794.078.752,00 | 6.620.190.149,00 | 0,00 |

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **6.620.190.149,00** dan pada TA 2023 tidak ada realisasi untuk belanja modal jalan irigasi dan jaringan. Realisasi pada TA 2024 terdiri atas:

Tabel 25 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 181.719.254,00 | 160.460.149,00 | 88,30 | 0,00 | |
| 2 | Belanja Modal Instalasi | 7.612.359.498,00 | 6.459.730.000,00 | 84,86 | 0,00 | |
| Jumlah | | 7.794.078.752,00 | 6.620.190.149,00 | 84,94 | 0,00 | |

Tabel 26 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pengadaan Jalan | 181.719.254,00 | 160.460.149,00 | 88,30 | 0,00 | |
| 2 | Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku | 1.295.592.000,00 | 1.236.000.000,00 | 95,40 | 0,00 | |
| 3 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 5.501.749.998,00 | 4.850.000.000,00 | 88,15 | 0,00 | |
| 4 | Belanja Modal Instalasi Pengaman | 815.017.500,00 | 373.730.000,00 | 45,86 | 0,00 | |
| Jumlah | | 7.794.078.752,00 | 6.620.190.149,00 | 84,94 | 0,00 | |

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp **6.620.190.149,00** , sedangkan pada TA 2023 tidak ada realisasi untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.



5.1.2.2.4 BELANJA MODAL ASET LAINNYA

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 45.853.500,00 |

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp **291.500.000,00** dan Rp **45.853.500,00**. Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 27 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

| No. | Uraian | TA. 2024 | | | TA. 2023 | Kenaikan/ (Penurunan) % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi | |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | |
| 1 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 0 | |
| 2 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | 0 | 0 | 45.853.500,00 | (100) |
| Jumlah | | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 45.853.500,00 | 535,72 |

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 245.646.500,00 atau sebesar 535,72 % dari tahun sebelumnya.

5.1.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

| Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2024 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (358.920.998.033,47) | (321.857.333.564,66) | (289.405.672.378,92) |

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

5.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5.2.1 ASET

| 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 742.526.031.057,74 | 695.239.670.040,49 |

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.2.1.1 ASET LANCAR

| 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 742.526.031.057,74 | 695.239.670.040,49 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

39.812.446.228,14

66.156.477.027,89

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

5.2.1.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.1.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.1.1.3 KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

26.147.773.211,65

39.376.080.136,75

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 26.147.773.211,65 dan Rp 39.376.080.136,75 terdiri dari saldo Kas pada dua RSUD dan 22 PKM serta satu Laboratorium Kesehatan yang merupakan UPT Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Kas BLUD

| No | Uraian | Saldo Kas BLUD (Rp) | | Saldo Kas BLUD (Rp) | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | Kenaikan / (Penurunan) | |
|----|------------------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------|
| | | Bank | Tunai | | | | (Rp) | % |
| 1 | RSUD H. Boejasin | 15.648.608.637,31 | 0 | 15.648.608.637,31 | 15.648.608.637,31 | 26.088.660.198,31 | 10.440.051.561,00 | (40,02) |
| 2 | RSUD KH. Mansyur | 6.260.112.789,08 | 0 | 6.260.112.789,08 | 6.260.112.789,08 | 5.081.865.621,47 | 1.178.247.167,61 | 23,19 |
| 3 | PKM Angsau | 412.936.031,17 | 0 | 412.936.031,17 | 412.936.031,17 | 405.619.509,16 | 7.316.522,01 | 1,804 |
| 4 | PKM Asam-Asam | 16.724.335,90 | 0 | 16.724.335,90 | 16.724.335,90 | 251.349.653,49 | 234.625.317,59 | (93,35) |
| 5 | PKM Batakan | 327.811.695,82 | 0 | 327.811.695,82 | 327.811.695,82 | 386.842.749,54 | 59.031.053,72 | (15,26) |
| 6 | PKM Bati-Bati | 329.239.796,35 | 0 | 329.239.796,35 | 329.239.796,35 | 459.516.880,96 | 130.277.084,61 | (28,35) |
| 7 | PKM Bumi Makmur | 156.531.753,09 | 0 | 156.531.753,09 | 156.531.753,09 | 136.078.359,96 | 20.453.393,13 | 15,03 |
| 8 | PKM Jorong | 141.554.121,53 | 0 | 141.554.121,53 | 141.554.121,53 | 120.913.353,31 | 20.640.768,22 | 17,07 |
| 9 | PKM Kait-Kait | 245.236.848,68 | 0 | 245.236.848,68 | 245.236.848,68 | 193.431.893,62 | 51.804.955,06 | 26,78 |
| 10 | PKM Kintap | 733.479.966,44 | 0 | 733.479.966,44 | 733.479.966,44 | 697.025.142,01 | 36.454.824,43 | 5,23 |
| 11 | PKM Kurau | 150.831.537,74 | 0 | 150.831.537,74 | 150.831.537,74 | 205.083.316,09 | 54.251.778,35 | (26,45) |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Saldo Kas BLUD (Rp) | | Saldo Kas BLUD (Rp) | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Bank | Tunai | | | | (Rp) | % |
| 12 | PKM Padang Luas | 213.490.043,68 | 0 | 213.490.043,68 | 213.490.043,68 | 381.428.022,04 | 167.937.978,36 | (44,03) |
| 13 | PKM Panyipatan | 164.760.872,94 | 0 | 164.760.872,94 | 164.760.872,94 | 167.400.142,37 | 2.639.269,43 | (1,577) |
| 14 | PKM Pelaihari | 71.926.168,72 | 0 | 71.926.168,72 | 71.926.168,72 | 22.439.118,33 | 49.487.050,39 | 220,5 |
| 15 | PKM Sungai Cuka | 133.559.929,90 | 0 | 133.559.929,90 | 133.559.929,90 | 83.303.256,15 | 50.256.673,75 | 60,33 |
| 16 | PKM Sungai Riam | 56.614.725,53 | 0 | 56.614.725,53 | 56.614.725,53 | 14.338.133,49 | 42.276.592,04 | 294,9 |
| 17 | PKM Tajau Pecah | 78.220.243,11 | 0 | 78.220.243,11 | 78.220.243,11 | 135.830.725,58 | 57.610.482,47 | (42,41) |
| 18 | PKM Tambang Ulang | 62.637.475,87 | 0 | 62.637.475,87 | 62.637.475,87 | 101.841.927,95 | 39.204.452,08 | (38,5) |
| 19 | PKM Takisung | 711.168.923,02 | 0 | 711.168.923,02 | 711.168.923,02 | 707.313.440,27 | 3.855.482,75 | 0,545 |
| 20 | PKM Tanjung Habulu | 141.775.202,00 | 0 | 141.775.202,00 | 141.775.202,00 | 115.818.811,52 | 25.956.390,48 | 22,41 |
| 21 | PKM Tirtajaya | 58.476.684,93 | 0 | 58.476.684,93 | 58.476.684,93 | 202.101.313,67 | 143.624.628,74 | (71,07) |
| 22 | PKM Durian Bungkok | 112.921.002,15 | 0 | 112.921.002,15 | 112.921.002,15 | 86.175.749,22 | 26.745.252,93 | 31,04 |
| 23 | PKM Bentok Kampung | 171.339.289,29 | 0 | 171.339.289,29 | 171.339.289,29 | 147.286.063,59 | 24.053.225,70 | 16,33 |
| 24 | Balai Labkes | 14.952.402,44 | 0 | 14.952.402,44 | 14.952.402,44 | 12.417.035,01 | 2.535.367,43 | 20,42 |
| 25 | PKM Panggung | 164.860.800,44 | 0 | 164.860.800,44 | 164.860.800,44 | 73.530.982,64 | 91.329.817,80 | 124,2 |
| Jumlah | | 26.147.773.211,65 | 0 | 26.147.773.211,65 | 26.147.773.211,65 | 39.376.080.136,75 | 9.697.840.122,62 | (26,73) |

Saldo Kas BLUD terdiri dari Saldo Kas BLUD dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, jasa layanan BLUD, pendapatan dari hasil kerjasama BLUD dan jasa giro pada 25 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per tanggal 31 Desember 2024. Rincian lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1.1**. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

5.2.1.1.4 KAS LAINNYA

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

5.428.734.391,00

3.098.481.737,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.428.734.391,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp **3.098.481.737,00**. Kas Lainnya merupakan saldo dari Penyaluran BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp **3.098.481.737,00** merupakan BOK Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan reklas ke Kas BOK pada tahun 2024.

PIUTANG

Piutang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yaitu piutang BLUD. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 29 Piutang

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | Kenaikan/(Penurunan) | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 10.218.615.217,00 | 10.219.536.448,00 | (921.231,00) | (0,01) |
| | Jumlah | 10.218.615.217,00 | 10.219.536.448,00 | (921.231,00) | (0,01) |

Penjelasan atas masing-masing piutang tersebut adalah sebagai berikut.

5.2.1.1.5 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2024
(Rp)

10.218.615.217,00

31 Desember 2023
(Rp)

10.219.536.448,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp **10.218.615.217,00** dan sebesar Rp **10.219.536.448,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | Kenaikan/(Penurunan) | |
|-----|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Piutang BLUD | 10.218.615.217,00 | 10.219.536.448,00 | (921.231,00) | (0,01) |
| | Jumlah | 10.218.615.217,00 | 10.219.536.448,00 | (921.231,00) | (0,01) |

1. Piutang BLUD

31 Desember 2024
(Rp)

10.218.615.217,00

31 Desember 2023
(Rp)

10.219.536.448,00

Piutang BLUD merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang BLUD merupakan piutang negara yang terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan lainnya. Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp10.218.615.217,00 dan Rp10.219.536.448,00

Piutang BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 31 Piutang BLUD

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 1 | PKM BATI-BATI | |
| 2 | PKM PANYIPATAN | 4.204,00 |
| 3 | PKM SUNGAI CUKA | |
| 4 | PKM KINTAP | |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 5 | PKM BATAKAN | 2.500,00 |
| 6 | PKM DURIAN BUNGKUK | |
| 7 | PKM TAKISUNG | |
| 8 | RSUD KH MANSYUR | 903.359.007,00 |
| 9 | RSUD H BOEJASIN | 10.211.001.413,00 |
| Jumlah | | 10.218.615.217,00 |

Rincian lengkap Piutang BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 4.3**.

5.2.1.1.6 PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2024
(Rp)

51.017.317,19

31 Desember 2023
(Rp)

51.012.711,03

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp51.017.317,19 dan sebesar Rp 51.012.711,03. Rincian Penyisihan bruto tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 32 Penyisihan Piutang

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 51.017.317,19 | 51.012.711,03 | 4.606,16 | 0,01 |
| Jumlah | | 51.017.317,19 | 51.012.711,03 | 4.606,16 | 0,01 |

5.2.1.1.7 PERSEDIAAN

31 Desember 2024
(Rp)

1.431.345.521,30

31 Desember 2023
(Rp)

16.408.190.623,11

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 1.431.345.521,30 dan Rp 16.408.190.623,11. Saldo Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD sebesar Rp4.040.408.698,22, serta BLUD sebesar Rp20.398.328.891. Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pembukuan BMD atas persediaan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicatat dengan menggunakan metode perpetual, artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Sedangkan Penilaian persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

dilakukan dengan metode harga perolehan terakhir, artinya metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Tabel 33 Rincian Persediaan Berasal dari dana BLUD

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 448.953.675 |
| 2 | Alat Listrik | 51.152.071 |
| 3 | Materai/Benda pos | 6.460.000 |
| 4 | Perabot Kantor | 153.382.013 |
| 5 | Natura | 76.529.905 |
| 6 | Barang Hibah | |
| 7 | Bahan Komputer | 102.299.722 |
| 8 | Bahan Kimia | 79.822.614 |
| 9 | Alat Kesehatan Habis Pakai | |
| 10 | Bahan Obat-Obatan | 13.453.750.668 |
| 11 | Obat Obatan Lainnya | 14.398.423 |
| 12 | Suku Cadang | |
| 13 | Kertas dan Cover | 125.946.491 |
| 14 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 819.550 |
| 15 | Bahan lainnya | 5.884.813.759 |
| 16 | Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | |
| 17 | Persediaan untuk tujuan strategis | |
| Jumlah | | 20.398.328.891 |

Tabel 34 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) |
|-----|---------------------|--------------------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 64.828.115 |
| 2 | Alat Listrik | 4.545.821 |
| 3 | Materai/Benda pos | 8.340.000 |
| 4 | Perabot Kantor | 104.975.287 |
| 5 | Natura | |
| 6 | Bahan Komputer | 29.399.850 |
| 7 | Bahan Kimia | 470.366.665 |
| 8 | Bahan Obat-Obatan | 1.799.500.556,45 |
| 9 | Obat Obatan Lainnya | 1.181.435,00 |
| 10 | Kertas dan Cover | 24.074.891 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|
| 11 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | |
| 12 | Bahan lainnya | 1.533.196.077,56 |
| Jumlah | | 4.040.408.698,22 |

OBAT/BMHP KADALUARSA/RUSAK TAHUN 2017 s.d. 2023

Dinas Kesehatan mempunyai OBAT/BMHP Kadaluarsa/Rusak dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 dari data Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp 3.050.262.503,14 Dengan Rincian Sebagai berikut :

OBAT/BMHP Kadaluarsa/Rusak Tahun 2017 smpai dengan Tahun 2023

| Tahun Kadaluarsa | SUMBER | | TOTAL |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | APBD | BPROV | |
| 2017 | Rp 23.573.754 | Rp 1.554.560 | Rp 25.128.314,00 |
| 2018 | Rp 237.781.885 | Rp 2.344.052 | Rp 240.125.937,00 |
| 2019 | Rp 177.963.502 | Rp 42.544.036 | Rp 220.507.538,00 |
| 2020 | Rp 285.054.656 | Rp 150.076.246 | Rp 435.130.902,00 |
| 2021 | Rp | Rp | Rp 916.793.009,00 |
| 2022 | Rp | Rp | Rp 501.759.465,14 |
| 2023 | Rp | Rp | Rp 710.817.338,00 |
| 2024 | Rp | Rp | Rp 1.605.430.247,20 |
| TOTAL | | | Rp 4.655.692.750,34 |

Pada Tahun 2023 Telah dilakukan Pemusnahan Untuk OBAT/BMHP Kadaluarsa/Rusak sebesar **Rp. 920.892.691,00** atau OBAT/BMHP Yang Kadaluarsa dari Periode 2017 s/d 2020.

OBAT/BMHP KADALUARSA/RUSAK TAHUN 2024

**LAPORAN OBAT/BMHP KADALUARSA/RUSAK
UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN TANAH LAUT**

PERIODE TAHUN 2024

| NO | NAMA OBAT / BMHP | Satuan | Harga Satuan | Bulan/Thn ED | Jumlah obat | Total Harga (Rp) |
|----|--|--------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | Albendazole 400 mg | Tablet | 463 | Jul'24 | 96 | 44,448,00 |
| 2 | Albendazole 400 mg | Tablet | 440 | | 3,475 | 1,529,000,00 |
| 3 | Alopurinol tablet 300 mg | Tablet | 180 | Feb'24 | 2,245 | 404,100,00 |
| 4 | Alopurinol tablet 300 mg | tablet | 200 | | 10,900 | 2,180,000,00 |
| 5 | Amoksisilin kapsul 500 mg | Kapsul | 208 | April'24 | 546 | 113,568,00 |
| 6 | Anti Bakteri DOEN | Tube | 3,508 | | 825 | 2,894,100,00 |
| 7 | Antifungi DOEN Kombinasi :Asam Benzoat 6% +Asam Salisilat 3% | Pot | 6,250 | Mei'24 | 2,288 | 14,300,000,00 |
| 8 | Asam Folat | Sachet | 45 | Mei'24 | 59,475 | 2,676,375,00 |
| 9 | Asam Mefenamat 500 mg | Tablet | 117 | Jun,Jul'24 | 336,963 | 39,424,671,00 |
| 10 | Asam Traneksamat tablet 500 mg | Tablet | 1,927 | Feb'24 | 704 | 1,356,608,00 |
| 11 | Aqua Pro Injeksi 20 ml | Vial | 2,860 | | 2 | 5,720,00 |
| 12 | Clyndamicin kapsul 150 mg | Kapsul | 1,650 | Feb'24 | 100 | 165,000,00 |
| 13 | Deksametason injeksi 5 mg/ml - 1 ml | ampul | 968 | Jun'24 | 79 | 76,472,00 |
| 14 | Domperidon tablet | tablet | 76 | | 40 | 3,040,00 |
| 15 | Gentamicin SK | Tube | 2,700 | Apr'24 | 9 | 24,300,00 |
| 16 | Gentamicin TM | Botol | 4,885 | | 297 | 1,450,845,00 |
| 17 | Glibenklamid tablet 5 mg | Tablet | 188 | Feb'24 | 555 | 104,340,00 |
| 18 | Glukosa larutan infus 5 % steril | Botol | 6,626 | Jul'24 | 3,535 | 23,422,910,00 |
| 19 | Griseofulvin tablet 125 mg, micronized | Tablet | 210 | Feb'24 | 653 | 137,130,00 |
| 20 | Hidroklorotiazid (HCT) tablet 25 mg | Tablet | 178 | Jul'24 | 49 | 8,722,00 |
| 21 | Hidrokortison krim 2,5% | Tube | 2,533 | Apr'24 | 364 | 922,012,00 |
| 22 | Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg | Tablet | 70 | Mei'24 | 83,189 | 5,823,230,00 |
| 23 | Loperamida Tablet 2 mg | Tablet | 92 | Apr'24 | 195 | 17,940,00 |
| 24 | Magnesium Sulfat inj (IV) 20% -25 ml | Vial | 4,120 | Jun'24 | 911 | 3,753,320,00 |
| 25 | Magnesium Sulfat inj (IV) 40% -25 ml | Vial | 4,700 | Jul'24 | 784 | 3,684,800,00 |
| 26 | Metil Ergometrin Maleat Injeksi 0,2mg/1ml | Ampul | 1,079 | Mei,Jul'24 | 2,163 | 2,333,877,00 |
| 27 | Metoklorpropamide Injeksi | Amp | 1,983 | Jun'24 | 40 | 79,320,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|------------------|--------|----------------|
| 28 | Metoklorpropamide Injeksi | | 3,959 | | 2,204 | 8,725,636,00 |
| 29 | Metronidazol tablet 500 mg | Tablet | 221 | Jan'24 | 10 | 2,210,00 |
| 30 | Natrium Diklofenak 50 mg tablet | Tablet | 109 | Jun'24 | 160 | 17,440,00 |
| 31 | Natrium Klorida Lar infus 0,9% steril | Botol | 6,900 | Jun'24 | 74 | 510,600,00 |
| 32 | Nistatin tablet Salut 500.000 IU | Tablet | 869 | Maret'24 | 4,420 | 3,840,980,00 |
| 33 | Nistatin tablet vagina 100.000 IU/g | Ovula | 645 | Maret'24 | 380 | 245,100,00 |
| 34 | Oksitosin injeksi 10 IU/ml - 1 ml | Ampul | 1,248 | Jun'24 | 76 | 94,848,00 |
| 35 | Oksitosin injeksi 10 IU/ml - 1 ml | | 1,127 | | 405 | 456,435,00 |
| 36 | Parasetamol sirup 120 mg/5 ml | Botol | 4,370 | Jan'24 | 27,690 | 121,005,300,00 |
| 37 | Parasetamol sirup 120 mg/5 ml | Botol | 1,160 | | 220 | 255,200,00 |
| 38 | Pirantel tablet 125 mg | Tablet | 331 | Jan, Feb, Mei'24 | 6,213 | 2,056,503,00 |
| 39 | Prednison tablet 5 mg | Tablet | 250 | Jun'24 | 1,210 | 302,500,00 |
| 40 | Primakuin tablet 15 mg | Tablet | 275 | Maret'24 | 590 | 162,250,00 |
| 41 | Propanolo 10 mg | Tablet | 109 | | 200 | 21,800,00 |
| 42 | Salbutamol 2 mg tablet | tablet | 144 | | 3,638 | 523,872,00 |
| 43 | Salep 2-4 Kombinasi Salep | Pot | 2,521 | Jul'24 | 17 | 42,857,00 |
| 44 | Sefotaxime inj 1 gram | Vial | 3,050 | Jun, Jul'24 | 5,178 | 15,792,900,00 |
| 45 | Sefksim 100 mg | Tablet | 458 | April'24 | 19,090 | 8,743,220,00 |
| 46 | Sefksim 100 mg | Tablet | 412 | | 1,550 | 638,600,00 |
| 47 | Sianokonalamina (Vit.B12) | Tablet | 53 | April'24 | 100 | 5,300,00 |
| 48 | Tablet Tambah Darah | Tablet | 255 | Feb'24 | 25 | 6,375,00 |
| 49 | Water pro injeksi 100 ml | Botol | 5,851 | Mei'24 | 255 | 1,492,005,00 |
| | OBAT PENUNJANG/GENERIK BERMERK | | | | - | |
| 1 | Bioplacenton Salep/Placenta Ekstrak + Neomicyn | Tube | 24,420 | April, Mei'24 | 1,595 | 38,949,900,00 |
| 2 | Bisoprolol | Tablet | 136 | Mei'24 | 540 | 73,440,00 |
| 3 | Candesartan 16 mg | Tablet | 322 | Mei'24 | 495 | 159,390,00 |
| 4 | Cendo Midric 0,5% tetes mata | Botol | 19,173 | Maret'24 | 100 | 1,917,300,00 |
| 5 | Cilostazol 100 mg | Tablet | 5,954 | Jan'24 | 900 | 5,358,600,00 |
| 6 | Desoximetason 0,1 % cream | Tube | 18,719 | Jun'24 | 750 | 14,039,250,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------|---------------|--------|---------------|
| 7 | Dextamin Tablet | Tablet | 1,815 | April'24 | 515 | 934,725,00 |
| 8 | Dulcolax supp | Supp | 30,504 | Mei'24 | 2 | 61,008,00 |
| 9 | Farbivent ampul Inhalation | Ampul | 3,951 | Jul'24 | 2,895 | 11,438,145,00 |
| 10 | Fenofibrate 300 mg | Tablet | 711 | Mei'24 | 7,550 | 5,368,050,00 |
| 11 | Ketoconazole 200 mg | Tablet | 234 | Mei'24 | 10,695 | 2,502,630,00 |
| 12 | Metilprednisolon 16 mg | Tablet | 456 | Jun'24 | 61,114 | 27,867,984,00 |
| 13 | Mometasone cream | Tube | 6,080 | Jul'24 | 25 | 152,000,00 |
| 14 | Multivitamin untuk dewasa/Curcuma Force tab | Tablet | 681 | Feb',Maret'24 | 87,542 | 59,616,102,00 |
| 15 | Obat Flu Novatusin sirup | Botol | 8,280 | Jul'24 | 8 | 66,240,00 |
| 16 | Ondancetron 8mg | Tablet | 285 | Mei'24 | 9,325 | 2,657,625,00 |
| 17 | Phermetrin salep 15 gr | Tube | 11,466 | Jul'24 | 51 | 584,766,00 |
| 18 | Spironolactone 25 mg | Tablet | 222 | Maret'24 | 2,055 | 456,210,00 |
| | SERUM DAN VAKSIN | | | | - | |
| 1 | Serum Anti Bisa Ular Injeksi 5 ml (ABU I) | Vial | 479,996 | Maret'24 | 16 | 7,679,936,00 |
| | BAHAN MEDIS HABIS PAKAI | | | | - | |
| 1 | Aseptic Gel 500 ml | Botol | 99,090 | April'24 | 13 | 1,288,170,00 |
| 2 | Bisturi | Kotak | 1,681 | Feb'24 | 121 | 203,425,20 |
| 3 | Catgut chromic No. 2/0 | Pcs | 25,236 | | 7 | 176,652,00 |
| 4 | Cat-Gut Plan No. 2/0 | Pcs | 5,750 | Mei'24 | 72 | 414,000,00 |
| 5 | Folly Catheter 18 | Pcs | 12,642 | Jan'24 | 10 | 126,420,00 |
| 6 | Iv. Catheter no.22 G | Pcs | 6,556 | Maret'24 | 156 | 1,022,736,00 |
| 7 | Iv. Catheter no.24 G | Pcs | 6,740 | April'24 | 53 | 357,220,00 |
| 8 | Kasa 4 x 5 cm | Pcs | 863 | Jun'24 | 7,755 | 6,692,565,00 |
| 9 | One Scrub | Botol | 66,024 | Jul-24 | 96 | 6,338,304,00 |
| 10 | Plester 15 cm x 5 m | Pcs | 75,000 | Mei'24 | 136 | 10,200,000,00 |
| 11 | Catgut chromic No. 3/0 | Pcs | 25,236 | | 58 | 1,463,688,00 |
| | REAGEN LABORATORIUM | | | | - | |
| 1 | Asam Urat Stik Humasens | Kotak | 368,651 | Feb'24 | 1 | 368,651,00 |
| 2 | Larutan Asam Acetat 6% 100 ml | Botol | 37,500 | Jan'24 | 84 | 3,150,000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|--------------|--------|----------------|
| 3 | Larutan Asam Acetat 6% 250 ml | Botol | 87,000 | Jan'24 | 28 | 2,436,000,00 |
| 4 | Larutan Widal | Set | 241,218 | Jan'24 | 44 | 10,613,592,00 |
| 1 | Program P2 TB.Paru | | | | - | |
| 1 | Pyrazinamide | Tablet | 230 | Jul'24 | 104 | 23,920,00 |
| 2 | Isoniazid 300 mg | Tablet | 150 | Feb'24 | 112 | 16,800,00 |
| 3 | Isoniazid 300 mg | | 336 | | 100 | 33,600,00 |
| | Program P2 Malaria | | | | - | |
| 1 | Primaquin | tablet | 242 | Maret'24 | 439 | 106,238,00 |
| | Program Gizi | | | | - | |
| 1 | Mineral Mix | Kotak | 3,116 | Jun'24 | 35 | 109,060,00 |
| 2 | Mineral Mix | Kotak | 119,604 | | 1,042 | 124,627,368,00 |
| 3 | Tablet Tambah Darah | tablet | 409 | | 0 | - |
| | | | | | - | |
| 1 | Efavirenz 200 | Botol | 139,487 | Mei'24 | 1 | 139,487,00 |
| 2 | Lamifudin | Botol | 99,600 | Jul-24 | 59 | 5,876,400,00 |
| | Program Penyakit Tidak Menular | | | | - | |
| 1 | Strip Glukosa Humasens | Box | 227,100 | Mei,Jun'i'24 | 80 | 18,168,000,00 |
| | NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA | | | | - | |
| 1 | Amitriptilin HCL tablet salut 25 mg | Tablet | 185 | Jun'24 | 473 | 87,505,00 |
| 2 | Diazepam injeksi 5 mg/ml 2 ml | ampul | 1,545 | Jul'24 | 570 | 880,650,00 |
| 3 | Diazepam 2 mg | tablet | 70 | Apr'24 | 10 | 700,00 |
| 4 | Fenobarbital tablet 30 mg | Tablet | 197 | Maret'24 | 115 | 22,655,00 |
| 5 | Haloperidol tablet 5 mg | Tablet | 54 | Jun'23/24 | 190 | 10,260,00 |
| 6 | Klobazam 10 mg tablet | Tablet | 384 | Jun'24 | 4,585 | 1,760,640,00 |
| 7 | Klozapin 25 mg tab | Tablet | 477 | Jun'24 | 3,020 | 1,440,540,00 |
| 8 | Klozapin 25 mg tab | Tablet | 473 | | 666 | 315,018,00 |
| 9 | Triheksifenidil Hidroklorida tablet 2 mg | Tablet | 63 | Jun'24 | 66,891 | 4,214,133,00 |
| 10 | Rhinofed | Tablet | 2,442 | Maret'24 | 270 | 659,340,00 |
| | BMHP COVID-19 | | | | - | |
| 1 | APD Level 3 | Pcs | 137,455 | Jun-24 | 4,039 | 555,180,745,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-----|---------|--|-----|-------------------------|
| 2 | APD Set 5 item | | 323,500 | | 3 | 970,500,00 |
| 3 | Blood Lancet | Box | 50,000 | | 6 | 300,000,00 |
| 4 | Gown | Pcs | 75,000 | | 308 | 23,100,000,00 |
| 5 | Coverall | Pcs | 70,000 | | 459 | 32,130,000,00 |
| NILAI TOTAL (Rp) | | | | | | 1,266,786,062,20 |

Dari Jumlah Obat Kadaluarsa di Tahun 2024 Sebanyak Rp. **1.605.430.247,20** Dinas Kesehatan Telah melakukan Pemusnahan OBAT/BMHP Kadaluarsa/Rusak Pada Bulan Desember 2024 sebesar Rp. **1.266.786.062,20**. Masih tersisa OBAT/BMHP Kadaluarsa/Rusak Tahun 2024 dari data Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp **338.644.185,00** yang belum dilakukan Pemusnahan Dengan Rincian Sebagai berikut :

| NO | UPT / Puskesmas | PERIODE | TOTAL (Rp) |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | IFK | AGUSTUS | 52,110,086,00 |
| | | SEPTEMBER | 161,752,007,00 |
| | | OKTOBER | 62,205,765,00 |
| | | NOVEMBER | 35,945,644,00 |
| | | DESEMBER | 3,252,200,00 |
| | | JUMLAH IFK | 315,265,702,00 |
| 2 | BATAKAN | Juli sd Desember | 896,040,00 |
| 3 | PELAIHARI | Juli sd Desember | 2,368,952,00 |
| 4 | BUMI MAKMUR | Juli sd Desember | 33,614,00 |
| 5 | ANGSAU | Juli sd Desember | 3,521,070,00 |
| 6 | TAKISUNG | Juli sd Desember | 71,419,00 |
| 7 | BENTOK KAMPUNG | Juli sd Desember | 1,165,978,00 |
| 8 | PANYIPATAN | Juli sd Desember | 1,930,668,00 |
| 9 | SUNGAI RIAM | Juli sd Desember | 3,940,979,00 |
| 10 | PADANG LUAS | Juli sd Desember | 520,341,00 |
| 11 | TANJUNG HABULU | Juli sd Desember | 1,309,037,00 |
| 12 | KINTAP | Juli sd Desember | 1,805,924,00 |
| 13 | TIRTA JAYA | Juli sd Desember | 235,787,00 |
| 14 | PANGGUNG | Juli sd Desember | 1,545,126,00 |
| 15 | TAJAU PECAH | Juli sd Desember | 51,270,00 |
| 16 | ASAM-ASAM | Juli sd Desember | 300,614,00 |
| 17 | TAMBANG ULANG | Juli sd Desember | 1,105,128,00 |
| 18 | SUNGAI CUKA | Juli sd Desember | 598,712,00 |
| 19 | KAIT-KAIT | Juli sd Desember | 1,611,262,00 |
| 20 | BATI-BATI | Juli sd Desember | 366,562,00 |
| NILAI TOTAL (Rp) | | | 338,644,185,00 |

Pemusnahan Sediaan Farmasi

KEGIATAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI DINAS KESEHATAN



UPT Instalasi memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola obat dan sediaan farmasi di lingkup kabupaten mulai dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan termasuk pemusnahan. Pengelolaan obat di instalasi farmasi dilakukan sesuai standar pelayanan untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutuserta untuk melindungi obat dan sediaan farmasi yang dikelola. pengawasan secara komprehensif juga dilakukan termasuk untuk obat dan sediaan farmasi yang akan mengalami masa kedaluwarsa.

Dalam pengelolaan obat dan sediaan farmasi, kondisi kedaluwarsa obat tidak dapat dihindari keberadaannya meskipun pengelolaan obat sudah dilakukan secara optimal, termasuk pengadaan obat dan sediaan farmasi yang sudah disesuaikan dengan rencana kebutuhan, hal ini dikarenakan dalam penyusunan rencana kebutuhan ada obat-obat yang wajib tersedia meskipun kejadian/kasus yang ditangani menggunakan obat tersebut kecil. Selain itu juga masa kedaluwarsa obat yang sekarang rata-rata hanya berjarak kurang lebih 2 tahun dari tanggal produksi yang belum dipotong waktu distribusi dari produsen hingga sampai ke pengguna yang kadang-kadang kurang dari dua tahun.

Pengelolaan di Instalasi farmasi kabupaten dalam rangka meminimalisir obat kedaluwarsa juga sudah dilakukan dengan metode relokasi obat, dimana instalasi farmasi melakukan kegiatan relokasi dari obat dari puskesmas ke puskesmas untuk obat-obat yang pergerakannya lambat atau tidak bergerak. Jikapun kedaluwarsa obat tidak dapat dihindarkan maka instalasi farmasi selama ini sudah melakukan kegiatan penerimaan pengembalian kedaluwarsa obat dari puskesmas dan pengumpulan obat kedaluwarsan dari Instalasi farmasi sendiri yang nantinya akan dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan untuk dilakukan pemusnahan obat.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelayanan farmasi ada kegiatan Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai apabila:

- a) produk tidak memenuhi persyaratan mutu;
- b) telah kadaluwarsa;
- c) tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan; dan/atau
- d) dicabut izin edarnya.



Pemusnahan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten Tanah Laut selama ini diserahkan kepada pihak ke tiga yang memiliki izin resmi dan dilakukan sesuai standar pemusnahan obat yaitu pengepakan, pengangkutan, hingga pemusnahan. Proses pemusnahan mulai dari pemeriksaan jumlah dan item obat yang akan dimusnahkan juga disaksikan pihak terkait seperti BPOM dan beberapa pihak dari pengawas aset daerah.

Adapun yang menjadi alasan obat mengalami kadaluarsa yaitu :

1. Pada tahun 2020- 2022, terjadi penurunan pasien yang sangat signifikan, dikarenakan pandemic Covid 19 sehingga pelayanan di upt dinas kesehatan menjadi sangat terbatas.
2. Poliklinik gigi pada saat covid hampir tidak beroperasi.

Pada Tahun 2024 dilakukan pemusnahan Obat/BMHP Kadaluarsa/Rusak sebanyak Rp. 3.396.155.874,34 Dengan Rincian Sebagai berikut :

**REKAP NILAI OBAT/ BMHP KADALUARSA YANG DIMUSNAHKAN
PADA TAHUN 2024**

| TAHUN KADALUWARSA | TOTAL |
|--------------------------|----------------------------|
| 2021 | Rp 916.793.009,00 |
| 2022 | Rp 501.759.465,14 |
| 2023 | Rp 710.817.338,00 |
| 2024 | Rp 1,266,786,062,20 |
| TOTAL | Rp 3.396.155.874.34 |

Pada Tahun 2025 juga akan dilakukan pemusnahan Obat/BMHP Kadaluarsa/Rusak menyesuaikan dengan besaran anggaran untuk pemusnahan Obat/BMHP Kadaluarsa/rusak yang tersedia pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

5.2.1.2 ASET TETAP

| | |
|--|--|
| 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
| 697.575.218.386,18 | 624.236.326.569,18 |

Saldo Aset Tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 sebesar Rp 697.575.218.386,18 dan tahun 2023 sebesar Rp 624.236.326.569,18 terdiri atas:



Tabel 35 Rincian Saldo Aset Tetap

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1. | Tanah | 26.639.789.466,15 | 26.639.789.466,15 | 0 | 0 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 403.932.962.260,80 | 350.635.151.094,80 | 53.297.811.166,00 | 15,2 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 530.780.361.366,91 | 517.359.470.864,91 | 13.420.890.502,00 | 2,59 |
| 4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 15.804.552.707,56 | 9.184.362.558,56 | 6.620.190.149,00 | 72,08 |
| 5. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 7.637.000,00 | 7.637.000,00 | 0 | 0 |
| 6. | Akumulasi Penyusutan | (279.590.084.415,24) | (279.590.084.415,24) | 0 | 0 |
| | Jumlah | 697.575.218.386,18 | 624.236.326.569,18 | 73.338.891.817,00 | 11,75 |

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut.

5.2.1.2.1

TANAH

31 Desember 2024

(Rp)

26.639.789.466,15

31 Desember 2023

(Rp)

26.639.789.466,15

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 26.639.789.466,15 dan Rp 26.639.789.466,15. Realisasi Tanah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan atau tetap dari tahun sebelumnya.

5.2.1.2.2

PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2024

(Rp)

403.932.962.260,80

31 Desember 2023

(Rp)

350.635.151.094,80

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 403.932.962.260,80 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 350.635.151.094,80. Realisasi peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 53.297.811.166 atau sebesar 15,2% .

5.2.1.2.3

GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2024

(Rp)

530.780.361.366,91

31 Desember 2023

(Rp)

517.359.470.864,91

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar dan 2023 sebesar Rp 530.780.361.366,91 dan Rp 517.359.470.864,91. Realisasi Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar RP 13.420.890.502,00 atau sebesar 2,59 % dari tahun sebelumnya.



5.2.1.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31 Desember 2024
(Rp)

15.804.552.707,5

31 Desember 2023
(Rp)

9.184.362.558,56

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 15.804.552.707,5 dan Rp 9.184.362.558,56. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.620.190.149,00 atau sebesar 72,8 % dari tahun sebelumnya.

5.2.1.2.5 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2024
(Rp)

7.637.000,00

31 Desember 2023
(Rp)

7.637.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 bernilai sama, yaitu sebesar Rp 7.637.000,00. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

31 Desember 2024
(Rp)

5.138.366.443,42

31 Desember 2023
(Rp)

4.846.866.443,42

Saldo Aset Lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.138.366.443,42 dan 2023 sebesar Rp4.846.866.443,42 terdiri atas:

Tabel 36 Rincian Saldo Aset Lainnya

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Aset Tak Berwujud | 541.539.000,00 | 250.039.000,00 | 291.500.000,00 | 116,58 |
| 2 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud | 5.951.636.864,58 | 5.951.636.864,58 | 0 | 0 |
| 3 | Aset Lain-lain | (221.732.210,52) | (221.732.210,52) | 0 | 0 |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (1.133.077.210,64) | (1.133.077.210,64) | 0 | 0 |
| Jumlah | | 5.138.366.443,42 | 4.846.866.443,42 | 291.500.000,00 | 6,01 |

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

5.2.1.3.1 ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2024
(Rp)

541.539.000,00

31 Desember 2023
(Rp)

250.039.000,00



Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp541.539.000,00 dan Rp250.039.000,00. Realisasi aset tak berwujud Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp291.500.000,00 atau sebesar 6,01 % dari tahun sebelumnya.

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.687.575.332,67 dan Rp7.986.630.612,00 terdiri atas:

Tabel 37 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | |
|-----|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Utang Belanja | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.612,00 | (2.430.812.516,73) | (28,79) |
| | Jumlah | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.612,00 | (2.299.055.279,33) | (28,79) |

Penjelasan atas saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

5.2.2.1.1 UTANG BELANJA

| 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 5.687.575.332,67 dan Rp 7.986.630.592,00 Utang Belanja terdiri dari Utang Barang dan Jasa sebesar Rp5.687.575.332,67.

Utang BLUD RSUD dan Puskesmas sebesar Rp..... terdiri dari:

Tabel 38 Utang BLUD RSUD dan Puskesmas

| NO | NAMA SKPD | SALDO AKHIR 2024 |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | PKM ANGS AU | 2.018.100,00 |
| 2 | PKM ASAM-ASAM | 6.945.400,48 |
| 3 | PKM BATAKAN | 5.833.799,79 |
| 4 | PKM BATI-BATI | 18.945.325,00 |
| 5 | PKM BUMI MAKMUR | 3.310.300,00 |
| 6 | PKM JORONG | 45.141.326,40 |
| 7 | PKM KAIT-KAIT | 0,00 |
| 8 | PKM KINTAP | 5.924.100,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| NO | NAMA SKPD | SALDO AKHIR 2024 |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| 9 | PKM KURAU | 1.892.800,00 |
| 10 | PKM PANYIPATAN | 9.241.303,00 |
| 11 | PKM PADANG LUAS | 0,00 |
| 12 | PKM PELAIHARI | 0,00 |
| 13 | PKM SUNGAI RIAM | 22.025.524,00 |
| 14 | PKM TAJAU PECAH | 0,00 |
| 15 | PKM TAKISUNG | 83.305.611,00 |
| 16 | PKM TAMBANG ULANG | 0,00 |
| 17 | PKM TANJUNG HABULU | 2.964.780,00 |
| 18 | PKM TIRTA JAYA | 1.784.300,00 |
| 19 | PKM SUNGAI CUKA | 5.915.180,00 |
| 20 | PKM BENTOK KAMPUNG | 1.325.680,00 |
| 21 | PKM DURIAN BUNGKUK | 0,00 |
| 22 | PKM PANGGUNG | 35.144.620,00 |
| 23 | RSUD H. BOEJASIN | 3.862.538.330,00 |
| 24 | RSUD KH.MANSYUR | 1.510.088.574,00 |
| Jumlah | | 5.687.575.332,67 |

Rincian utang BLUD pada Lampiran 13.1

Tabel 39 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Beban Jasa telepon | 176.775 | 27.556.188 | | |
| 2 | Beban Jasa air | 1.757.300 | 3.945.400 | | |
| 3 | Beban Jasa listrik | 70.537.507 | 286.547.427 | | |
| 4 | Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet | | | | |
| 5 | Beban Jasa Medis | | | | |
| 6 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 0 | 682.334.400 | | |
| Jumlah | | 5.687.575.332 | 7.986.630.592 | | |

5.2.3 EKUITAS

31 Desember 2024
(Rp)

519.771.668.220,48

31 Desember 2023
(Rp)

480.219.449.135,16

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp519.771.668.220,48 dan Rp480.219.449.135,16. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.



5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.3.1.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 40 Pendapatan LO

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Retribusi Daerah | 79.358.588.559,78 | 166.500.000,00 | 79.192.088.559,78 | 47.562,82 |
| 2 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 19.565.521.792,15 | 88.266.529.990,68 | (68.701.008.198,53) | (77,83) |
| Jumlah | | 98.924.110.351,93 | 88.433.029.990,68 | 10.491.080.361,25 | 11,86 |

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp166.500.000,00

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2024 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 41 Pendapatan Retribusi

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Retribusi Pelayanan kesehatan | 79.115.833.646,00 | 0 | | |
| 2 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 85.316.000,00 | 0 | | |
| 3 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 148.750.000,00 | 165.000.000,00 | (16.250.000,00) | (9,85) |
| 4 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 2.388.913,78 | 0 | | |
| 5 | Retribusi Pemakaian Ruang | 6.300.000,00 | 1.500.000,00 | 4.800.000,00 | 320,00 |
| Jumlah | | 79.358.588.559,78 | 166.500.000,00 | 79.192.088.559,78 | 47.562,82 |



Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp**79.192.088.559,78** atau sebesar **47.562,82%**. Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi (LRA) dan Pendapatan Retribusi (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 42 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Retribusi Daerah (LRA) | Rp 79.695.108.248,78 |
| Pendapatan Retribusi Daerah (LO) | Rp 79.358.588.559,78 |
| Selisih | Rp 336.519.689,00 |

5.3.1.1.2 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 43 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO | 328.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pendapatan dari BLUD | 89.336.258,00 | 6.484.777.407,66 | (6.395.441.149,66) | (98,62) |
| 3 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 18.412.146.078,74 | 80.033.614.581,95 | (61.621.468.503,21) | (76,99) |
| 4 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 199.082.357,15 | 519.300.826,40 | (320.218.469,25) | (61,66) |
| 5 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah | 864.628.598,26 | 1.228.837.174,67 | (364.208.576,41) | (29,64) |
| Jumlah | | 19.565.521.792,15 | 88.266.529.990,68 | (68.701.008.198,53) | (77,83) |

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan Rp 68.701.008.198,53 atau sebesar 77,83 %.

Perbedaan antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah (LO) adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Lain-lain PAD Yang Sah (LRA) | Rp 19.452.741.446,56 |
| Lain-lain PAD Yang Sah (LO) | Rp 19.565.521.792,15 |
| Selisih | Rp 112.780.345,59 |

5.3.1.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **352.840.701.099,35**, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45 Rincian Beban

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Pegawai | 126.418.953.134,00 | 112.633.594.756,00 | 13.785.358.378,00 | 12,24 |
| 2 | Persediaan | 35.238.787.366,81 | 13.216.854.897,33 | 22.021.932.469,48 | 166,62 |
| 3 | Jasa | 84.676.594.825,00 | 87.047.021.976,00 | (2.370.427.151,00) | (2,72) |
| 4 | Pemeliharaan | 3.525.080.038,00 | 1.297.206.744,00 | 2.227.873.294,00 | 171,74 |
| 5 | Perjalanan Dinas | 3.657.448.098,00 | 6.899.039.384,00 | (3.241.591.286,00) | (46,99) |
| 6 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 169.000.000,00 | 109.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,05 |
| 7 | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 11.365.431.533,00 | 0 | 11.365.431.533,00 | 100,00 |
| 8 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 94.400.053.419,67 | 85.672.041.164,50 | 8.728.012.255,17 | 10,19 |
| 9 | Beban Hibah | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |
| 10 | Beban Penyisihan Piutang | (4.606,16) | (35.715.031,90)) | 35.710.425,74 | (99,99) |
| Jumlah | | 360.011.175.923,32 | 307.295.662.471,93 | 52.715.513.451,39 | 17,15 |

Realisasi Beban Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp **52.715.513.451,39** atau sebesar **17,15%** dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

5.3.1.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Tabel 46 Rincian Beban Operasi

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan/(Penurunan) | |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Pegawai | 126.418.953.134,00 | 112.633.594.756,00 | 13.785.358.378,00 | 12,24 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 233.032.395.280,48 | 194.241.164.165,83 | 38.791.231.114,65 | 19,97 |
| 3 | Beban Hibah | 559.832.115,00 | 103.213.533,00 | 219.481.418,00 | 22,60 |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang | (4.606,16) | (35.715.031,90) | 35.710.425,74 | (99,99) |
| Jumlah | | 360.011.175.923,32 | 307.295.662.471,93 | 52.715.513.451,39 | 17,15 |

5.3.1.2.1.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 126.474.661.738,00 dan Rp 112.633.594.756,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 47 Rincian Beban Pegawai

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Gaji Pokok ASN | 51.650.647.358,00 | 45.995.907.324,00 | 5.654.740.034,00 | 12,29 |
| 2 | Beban Tunjangan Keluarga | 4.078.586.322,00 | 3.587.161.248,00 | 491.425.074,00 | 13,70 |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan | 328.090.000,00 | 327.325.000,00 | 765.000,00 | 0,23 |
| 4 | Beban Tunjangan Fungsional | 5.528.980.000,00 | 5.230.229.000,00 | 298.751.000,00 | 5,71 |
| 5 | Beban Tunjangan Fungsional Umum | 204.365.000,00 | 317.580.000,00 | (113.215.000,00) | (35,65) |
| 6 | Beban Tunjangan Beras | 2.598.429.600,00 | 2.501.966.160,00 | 96.463.440,00 | 3,86 |
| 7 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.871.042.498,00 | 2.125.755.146,00 | 1.745.287.352,00 | 82,10 |
| 8 | Beban Pembulatan Gaji | 815.396,00 | 722.847,00 | 92.549,00 | 12,80 |
| 9 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 3.849.166.897,00 | 3.641.544.491,00 | 207.622.406,00 | 5,70 |
| 10 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 106.481.711,00 | 94.763.097,00 | 11.718.614,00 | 12,37 |
| 11 | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 319.448.046,00 | 284.290.986,00 | 35.157.060,00 | 12,37 |
| 12 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 31.905.675.806,00 | 29.998.704.691,00 | 1.906.971.115,00 | 6,36 |
| 13 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 9.761.176.979,00 | 9.061.392.891,00 | 699.784.088,00 | 7,72 |
| 14 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 3.047.384.310,00 | 2.748.376.707,00 | 299.007.603,00 | 10,88 |
| 15 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 941.035.076,00 0,00 | 0,00 | 941.035.076,00 | 100,00 |
| 16 | Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 5.415.000,00 | 0,00 | 5.415.000,00 | 100,00 |
| 17 | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 935.620.076,00 | 0,00 | 935.620.076,00 | 100,00 |
| 18 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 100,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | (Rp) | % |
| 19 | Beban Pegawai BLUD | 7.472.900.000,00 | 6.248.900.000,00 | 1.224.000.000,00 | 19,59 |
| Jumlah | | 126.418.953.134,00 | 112.633.594.756,00 | 13.785.358.378,00 | 12,24 |

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.785.358.378,00 atau sebesar 12,24% dari tahun sebelumnya. Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai di LRA dengan Beban Pegawai pada LO.

5.3.1.2.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 233.032.395.280,48 dan Rp 194.241.164.165,83. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

1) Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 35.238.787.366,81 dan Rp 13.216.854.897,33. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Beban Persediaan

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 46.381.271,00 | 0,00 | 46.381.271,00 | 100,00 |
| 2 | Beban Bahan-Bahan Kimia | 1.963.697.214,27 | 46.702.757,73 | 1.916.994.456,54 | 4.104,67 |
| 3 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 271.579.199,00 | 223.732.350,00 | 47.846.849,00 | 21,39 |
| 4 | Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3.045.000,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 100,00 |
| 5 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 0,00 | 1.950.000,00 | (1.950.000,00) | (100,00) |
| 6 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 10.265.173.118,43 | 3.218.659.510,21 | 7.046.513.608,22 | 218,93 |
| 7 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 0,00 | 340.000,00 | (340.000,00) | (100,00) |
| 8 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 2.232.834.854,00 | 299.504.664,86 | 1.933.330.189,14 | 645,51 |
| 10 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 478.994.750,00 | 69.837.194,50 | 409.157.555,50 | 585,87 |
| 12 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 0,00 | 39.748.000,00 | (39.748.000,00) | (100,00) |
| 13 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 35.360.000,00 | 35.960.000,00 | (600.000,00) | (1,67) |
| 14 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 223.756.503,00 | 138.623.960,00 | 85.132.543,00 | 61,41 |
| 15 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 639.573.946,00 | 246.307.512,00 | 393.266.434,00 | 159,66 |
| 16 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 100.449.251,00 | 345.105,00 | 100.104.146,00 | 29.006,87 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 17 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4.595.400,00 | 5.500.000,00 | (904.600,00) | (16,45) |
| 18 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | 0,00 | 2.520.000,00 | (2.520.000,00) | (100,00) |
| 19 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata | 296.375.418,00 | 0,00 | 296.375.418,00 | 100,00 |
| 20 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 13.037.000,00 | 607.731.047,00 | (594.694.047,00) | (97,85) |
| 21 | Beban Obat-Obatan-Obat | 7.779.550.138,15 | 3.303.054.050,03 | 4.476.496.088,12 | 135,53 |
| 22 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3.583.588.758,96 | 317.411.985,00 | 3.266.176.773,96 | 1.029,00 |
| 23 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 3.888.830.700,00 | 1.574.743.581,00 | 2.314.087.119,00 | 146,95 |
| 24 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 25 | Beban Natura dan Pakan-Natura | 4.657.320,00 | (4.657.320,00) | 9.314.640,00 | (200,00) |
| 26 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 1.923.095.000,00 | 2.361.445.000,00 | (438.350.000,00) | (18,56) |
| 28 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 16.000.000,00 | 1.250.000,00 | 14.750.000,00 | 1.180,00 |
| 29 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 137.895.000,00 | 0,00 | 137.895.000,00 | 100,00 |
| 30 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 930.795.000,00 | 720.770.500,00 | 210.024.500,00 | 29,14 |
| 33 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 25.427.000,00 | 0,00 | 25.427.000,00 | 100,00 |
| 34 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 70.980.000,00 | 5.375.000,00 | 65.605.000,00 | 1.220,56 |
| 35 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 8.015.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Beban Pakaian Olahraga | 291.300.525,00 | 0,00 | 291.300.525,00 | 100,00 |
| Jumlah | | 35.238.787.366,81 | 13.216.854.897,33 | 22.021.932.469,48 | 166,62 |

Realisasi Beban Persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.021.932.469,48 atau sebesar 166,62 % dari tahun sebelumnya.

2) Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 84.676.594.825,00 dan Rp 87.047.021.976,00. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 49 Rincian Beban Jasa

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Jasa Kantor | 27.465.046.700,00 | 28.954.723.986,00 | (1.489.677.286,00) | (5,14) |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 55.542.292.488,00 | 57.332.603.870,00 | (1.790.311.382,00) | (3,12) |
| 3 | Beban Sewa Tanah | 0,00 | 35.640.000,00 | (35.640.000,00) | (100,00) |
| 4 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 350.098.300,00 | 18.101.120,00 | 331.997.180,00 | 1.834,13 |
| 5 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 51.200.000,00 | 14.200.000,00 | 37.000.000,00 | 260,56 |
| 6 | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 9.000.000,00 | (9.000.000,00) | (100,00) |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0,00 | 99.443.000,00 | (99.443.000,00) | (100,00) |
| 8 | Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability) | 213.290.000,00 | 0,00 | 213.290.000,00 | 100,00 |
| 9 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis | 1.054.667.337,00 | 583.310.000,00 | 471.357.337,00 | 80,81 |
| Jumlah | | 84.676.594.825,00 | 87.047.021.976,00 | (2.370.427.151,00) | (2,72) |

Realisasi Beban Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 2.370.427.151,00 atau sebesar 2,72% dari tahun sebelumnya.

Tabel 50 Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Belanja Jasa (LRA) | 85.604.506.658,00 |
| Beban Jasa (LO) | 84.676.594.825,00 |
| Selisih | 927.911.833 |

3) BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.525.080.038,00 dan Rp1.297.206.744,00 Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Beban Pemeliharaan

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 892.512.185,00 | 559.985.900,00 | 332.526.285,00 | 59,38 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.632.567.853,00 | 684.620.844,00 | 1.947.947.009,00 | 284,53 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 52.600.000,00 | (52.600.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 3.525.080.038,00 | 1.297.206.744,00 | 2.227.873.294,00 | 171,74 |

Realisasi Beban Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.227.873.294,00 atau sebesar 171,74 % dari



tahun sebelumnya. Tidak ada perbedaan anantara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan.

4) BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.657.448.098,00 dan Rp 6.899.039.384,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian Beban Perjalanan Dinas

| No. | | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.411.565.750,00 | 5.874.391.250,00 | (4.462.825.500,00) | (75,97) |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 2.245.882.348,00 | 888.648.134,00 | 1.357.234.214,00 | 152,73 |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0,00 | 136.000.000,00 | (136.000.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 3.657.448.098,00 | 6.899.039.384,00 | (3.241.591.286,00) | (46,99) |

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 3.241.591.286,00 atau sebesar 46,99 % dari tahun sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas.

5.3.1.2.1.3 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2024 Tanggal 21 Juli 2024 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 559.832.115,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 456.618.582,00 . Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Beban Hibah

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Hibah Uang kepada BUMD | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |
| Jumlah | | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |

Realisasi Beban Hibah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 103.213.533,00 atau sebesar 22,60% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Hibah dan Beban Hibah tidak terdapat perbedaan realisasi.

5.3.1.2.1.4 BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp169.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 109.000.000,00 . Adapun Rincian adalah sebagai berikut.



Tabel 54 Rincian Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 169.000.000,00 | 109.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,05 |
| Jumlah | | 169.000.000,00 | 109.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,05 |

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 60.000.000,00 atau sebesar 55,05 % dari tahun sebelumnya. Antara Belanja untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Beban untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tidak terdapat perbedaan realisasi.

5.3.1.2.1.5 BEBAN BARANG DAN JASA BOK PUSKESMAS

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 11.365.431.533,00 dan Rp 0. Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas adalah sebagai berikut.

Tabel 55 Rincian Barang dan Jasa BOK Puskesmas

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 11.365.431.533,00 | 0,00 | 11.365.431.533,00 | 100,00 |
| Jumlah | | 11.365.431.533,00 | 0,00 | 11.365.431.533,00 | 100,00 |

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.365.431.533,00 atau sebesar 100 % dari tahun sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

5.3.1.2.1.6 BEBAN BARANG DAN JASA BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 94.400.053.419,67 dan Rp 85.672.041.164,50 . Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD adalah sebagai berikut.

Tabel 56 Rincian Barang dan Jasa BLUD

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 94.400.053.419,67 | 85.672.041.164,50 | 8.728.012.255,17 | 10,19 |
| Jumlah | | 94.400.053.419,67 | 85.672.041.164,50 | 8.728.012.255,17 | 10,19 |

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.728.012.255,17 atau sebesar 10,19% dari tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Beban Barang dan Jasa BLUD.

Tabel 57 Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD LRA dan LO



| | |
|---|-------------------------|
| Belanja Barang dan Jasa BLUD (LRA) | 95.640.621.113,00 |
| Beban Barang dan Jasa BLUD (LO) | 94.400.053.419,67 |
| Selisih | 1.240.567.693,33 |

5.3.1.2.1.7 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp (4.606,16) dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp (35.715.031,90) Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Rincian Beban Penyisihan Piutang

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | (0,00) | (35.715.031,90) | 35.715.031,90 | (100,00) |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | (4.606,16) | 0,00 | (4.606,16) | 0,00 |
| Jumlah | | (4.606,16) | (35.715.031,90) | 35.710.425,74 | (99,99) |

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.710.425,74 atau sebesar 99,99 % dari tahun sebelumnya.

5.3.1.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2024 sebesar Rp 0 dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp **49.184.704,76**

1) **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0

2) **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **49.184.704,76** Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 59 Rincian Beban Amortisasi

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 (Rp) | Tahun Anggaran 2023 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 | Kenaikan / (Penurunan) | |
|-----|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| | Jumlah | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp **49.184.704,76** atau sebesar 99,99 % dari tahun sebelumnya.

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 480.219.449.135,16 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2024 sebesar Rp 699.127.986.921,17 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 253.914.597.747,42 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 954.269.311,71

5.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 480.219.449.135,16 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023.

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2024

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp (253.914.597.747,42) berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2024. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

5.4.3 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp 954.269.311,71 Rincian untuk masing-masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 60 Koreksi Ekuitas

| No. | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Koreksi Ekuitas – Lainnya | 954.269.311,71 | 3.279.400,00 |
| | Jumlah Koreksi Ekuitas | 954.269.311,71 | 3.279.400,00 |
| | | | |



BAB VI PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024..

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp 100.260.140.719,00 dan terealisasi sebesar Rp99.147.099.694,38 atau 98,89 %. Belanja dianggarkan sebesar Rp 459.181.138.752,47 yang terealisasi sebesar Rp 421.005.183.260,00 atau 91,69 %. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan berusaha meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut**



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
NIP. 19740612 200501 2 016



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GRAFIK..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | viii |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... | 1 |
| B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH..... | 3 |
| C. NERACA..... | 4 |
| D. LAPORAN OPERASIONAL..... | 6 |
| E. LAPORAN ARUS KAS..... | 8 |
| F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... | 11 |
| G. CATATAN ATAS PERUBAHAN KEUANGAN..... | 12 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 12 |
| DATA UMUM..... | 12 |
| Letak Geografis..... | 12 |
| PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN..... | 12 |
| Sumber Daya Lahan..... | 12 |
| SUMBER DAYA HUTAN..... | 13 |
| Sumber Daya Air..... | 13 |
| Sumber Daya Mineral..... | 13 |
| Struktur Organisasi..... | 13 |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... | 18 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah..... | 19 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan PemErintah Daerah..... | 20 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... | 22 |
| 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional..... | 22 |
| 2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN..... | 22 |
| 2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA..... | 23 |
| 2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)..... | 24 |
| 2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA..... | 24 |
| 2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI..... | 25 |
| 2.1.6 INFLASI..... | 26 |
| 2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT..... | 26 |
| 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN..... | 27 |



| | | | |
|---|---|-----|----|
| 2.2.1 | KEBIJAKAN PENDAPATAN | 27 | |
| 2.2.2 | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 28 | |
| 2.2.3 | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 29 | |
| 2.2.4 | PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 30 | |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .32 | | | |
| 3.1 | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah daerah | .32 | |
| 3.2 | Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan | 32 | |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | | | 33 |
| 4.1 | Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali..... | 33 | |
| 4.2 | Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah | 33 | |
| 4.3 | Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan..... | 33 | |
| 4.4 | Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... | 34 | |
| 4.4.1 | Akuntansi Pendapatan – LRA / LO..... | 34 | |
| 4.4.2 | Akuntansi Belanja - Beban..... | 34 | |
| 4.4.3 | Akuntansi Pembiayaan | 35 | |
| 4.4.4 | Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran | 36 | |
| 4.4.5 | Akuntansi Kas dan Setara Kas | 37 | |
| 4.4.6 | Akuntansi Piutang | 37 | |
| 4.4.7 | Akuntansi Persediaan..... | 38 | |
| 4.4.8 | Akuntansi Investasi..... | 38 | |
| 4.4.9 | Akuntansi Aset Tetap..... | 41 | |
| 4.4.10 | Akuntansi Kewajiban..... | 44 | |
| 4.4.11 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 44 | |
| 4.4.12 | Akuntansi Ekuitas..... | 44 | |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | | | 45 |
| 5.1 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... | 45 | |
| 5.1.1 | PENDAPATAN | 45 | |
| 4.1 | 45 | | |
| 4.2 | 45 | | |
| 4.2.1 | | 45 | |
| 4.2.2 | | 45 | |
| 5.1.2 | BELANJA..... | 48 | |
| 5.1.3 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)..... | 55 | |
| 5.2 | Neraca..... | 55 | |
| 5.2.1 | ASET | 55 | |



| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 5.2.2 | KEWAJIBAN..... | 71 |
| 5.2.3 | Ekuitas | 72 |
| 5.3 | Laporan Operasional | 73 |
| 5.3.1 | KEGIATAN OPERASIONAL..... | 73 |
| 5.4 | Penjelasan Atas Laporan perubahan Ekuitas | 83 |
| 5.4.1 | Ekuitas Awal | 83 |
| 5.4.2 | Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 | 83 |
| 5.4.3 | DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR | 83 |
| BAB VI PENUTUP..... | | 84 |
| DAFTAR ISI..... | | i |
| DAFTAR TABEL | | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR GRAFIK | | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | | vi |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

DINAS KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 98,89 | 81.951.620.838,08 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 78.932.426.502,00 | 79.695.108.248,78 | 100,97 | 166.500.000,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 78.749.102.502,00 | 79.452.353.335,00 | 100,89 | 0,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 78.749.102.502,00 | 79.452.353.335,00 | 100,89 | 0,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 1.985.451.400,00 | 2.267.233.937,00 | 114,19 | 0,00 |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 76.763.651.102,00 | 77.185.119.398,00 | 100,55 | 0,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 183.324.000,00 | 242.754.913,78 | 132,42 | 166.500.000,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 183.324.000,00 | 242.754.913,78 | 132,42 | 166.500.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 39.224.000,00 | 85.316.000,00 | 217,51 | 0,00 |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 139.500.000,00 | 148.750.000,00 | 106,63 | 165.000.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 1.600.000,00 | 2.388.913,78 | 149,31 | 0,00 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruang | 3.000.000,00 | 6.300.000,00 | 210,00 | 1.500.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 21.327.714.217,00 | 19.452.741.446,56 | 91,21 | 81.785.120.838,08 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 500.000,00 | 328.500,00 | 65,70 | 0,00 |
| 4.1.04.15.99 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 500.000,00 | 328.500,00 | 65,70 | 0,00 |
| 4.1.04.15.99.0002 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD | 500.000,00 | 328.500,00 | 65,70 | 0,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 21.327.214.217,00 | 19.452.412.946,56 | 91,21 | 81.785.120.838,08 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.368.255,06 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.368.255,06 |
| 4.1.04.16.02 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 20.280.247.548,00 | 18.379.114.817,00 | 90,63 | 80.033.614.581,95 |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 20.280.247.548,00 | 18.379.114.817,00 | 90,63 | 80.033.614.581,95 |
| 4.1.04.16.04 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 200.415.471,00 | 206.332.000,00 | 102,95 | 519.300.826,40 |
| 4.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 200.415.471,00 | 206.332.000,00 | 102,95 | 519.300.826,40 |
| 4.1.04.16.06 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 846.551.198,00 | 866.966.129,56 | 102,41 | 1.228.837.174,67 |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro | 846.551.198,00 | 866.966.129,56 | 102,41 | 212.551.324,36 |
| 4.1.04.16.06.0002 | Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.285.850,31 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 98,89 | 81.951.620.838,08 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 100.260.140.719,00 | 99.147.849.695,34 | 98,89 | 81.951.620.838,08 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 459.181.138.752,47 | 420.833.206.771,00 | 91,65 | 371.357.293.217,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 376.258.772.497,00 | 347.202.814.954,00 | 92,28 | 298.857.468.222,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 131.232.928.695,00 | 126.418.953.134,00 | 96,33 | 111.289.348.709,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 74.732.337.095,00 | 72.536.052.828,00 | 97,06 | 64.107.245.299,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 52.341.070.821,00 | 51.650.647.358,00 | 98,68 | 45.995.907.324,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 48.267.403.093,00 | 47.784.208.406,00 | 99,00 | 44.333.960.324,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 4.073.667.728,00 | 3.866.438.952,00 | 94,91 | 1.661.947.000,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 4.148.100.458,00 | 4.078.586.322,00 | 98,32 | 3.587.161.248,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 3.813.949.910,00 | 3.787.857.426,00 | 99,32 | 3.474.543.968,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 334.150.548,00 | 290.728.896,00 | 87,01 | 112.617.280,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 419.350.000,00 | 328.090.000,00 | 78,24 | 327.325.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 379.350.000,00 | 328.090.000,00 | 86,49 | 327.325.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0002 | Belanja Tunjangan Jabatan PPPK | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 5.709.220.000,00 | 5.528.980.000,00 | 96,84 | 5.230.229.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 5.270.880.000,00 | 5.205.500.000,00 | 98,76 | 5.073.679.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 438.340.000,00 | 323.480.000,00 | 73,80 | 156.550.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 234.710.000,00 | 204.365.000,00 | 87,07 | 317.580.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 212.590.000,00 | 185.775.000,00 | 87,39 | 312.180.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 22.120.000,00 | 18.590.000,00 | 84,04 | 5.400.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 2.639.435.001,00 | 2.598.429.600,00 | 98,45 | 2.501.966.160,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 2.387.992.761,00 | 2.382.980.100,00 | 99,79 | 2.411.006.640,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 251.442.240,00 | 215.449.500,00 | 85,69 | 90.959.520,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.941.018.916,00 | 3.871.042.498,00 | 98,22 | 2.125.755.146,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.930.218.916,00 | 3.871.042.498,00 | 98,49 | 2.104.865.042,00 |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.890.104,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 1.767.424,00 | 815.396,00 | 46,13 | 722.847,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1.663.264,00 | 736.305,00 | 44,27 | 685.779,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 104.160,00 | 79.091,00 | 75,93 | 37.068,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 3.955.768.662,00 | 3.849.166.897,00 | 97,31 | 3.641.544.491,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 3.621.783.910,00 | 3.593.526.970,00 | 99,22 | 3.500.000.000,00 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 333.984.752,00 | 255.639.927,00 | 76,54 | 141.544.491,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 127.473.439,00 | 106.481.711,00 | 83,53 | 94.763.097,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 115.411.519,00 | 98.377.916,00 | 85,24 | 91.173.240,00 |

| KodeRekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 12.061.920,00 | 8.103.795,00 | 67,18 | 3.589.857,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 382.422.374,00 | 319.448.046,00 | 83,53 | 284.290.986,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 346.236.736,00 | 295.136.778,00 | 85,24 | 273.521.451,00 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 36.185.638,00 | 24.311.268,00 | 67,18 | 10.769.535,00 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 832.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 82.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 47.461.410.894,00 | 45.467.255.230,00 | 95,80 | 40.933.203.410,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 32.927.293.193,00 | 31.905.675.806,00 | 96,90 | 28.654.458.644,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 30.429.338.200,00 | 29.752.955.048,00 | 97,78 | 27.968.187.529,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 2.497.954.993,00 | 2.152.720.758,00 | 86,18 | 686.271.115,00 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 11.246.448.827,00 | 10.514.195.114,00 | 93,49 | 9.530.368.059,00 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 10.121.103.422,00 | 9.761.176.979,00 | 96,44 | 9.061.392.891,00 |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | 1.125.345.405,00 | 753.018.135,00 | 66,91 | 468.975.168,00 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 3.287.668.874,00 | 3.047.384.310,00 | 92,69 | 2.748.376.707,00 |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 2.978.197.547,00 | 2.910.998.714,00 | 97,74 | 2.576.326.817,00 |
| 5.1.01.02.04.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK | 309.471.327,00 | 136.385.596,00 | 44,07 | 172.049.890,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 1.258.606.306,00 | 941.035.076,00 | 74,77 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 6.885.600,00 | 5.415.000,00 | 78,64 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 6.885.600,00 | 5.415.000,00 | 78,64 | 0,00 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.251.720.706,00 | 935.620.076,00 | 74,75 | 0,00 |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.251.720.706,00 | 935.620.076,00 | 74,75 | 0,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.174.400,00 | 1.710.000,00 | 78,64 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 2.174.400,00 | 1.710.000,00 | 78,64 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.174.400,00 | 1.710.000,00 | 78,64 | 0,00 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 7.778.400.000,00 | 7.472.900.000,00 | 96,07 | 6.248.900.000,00 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 7.778.400.000,00 | 7.472.900.000,00 | 96,07 | 6.248.900.000,00 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 7.778.400.000,00 | 7.472.900.000,00 | 96,07 | 6.248.900.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.349.743.802,00 | 220.224.029.705,00 | 90,13 | 187.111.500.931,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 22.916.221.314,00 | 20.261.942.265,00 | 88,42 | 10.886.603.627,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 22.916.221.314,00 | 20.261.942.265,00 | 88,42 | 10.886.603.627,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 55.042.778,00 | 46.381.271,00 | 84,26 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 3.477.760,00 | 2.091.200,00 | 60,13 | 955.343.550,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 299.979.872,00 | 271.579.199,00 | 90,53 | 223.732.350,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3.379.950,00 | 3.045.000,00 | 90,09 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 5.189.505.275,00 | 4.765.470.012,00 | 91,83 | 1.575.849.562,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.510.546.875,00 | 1.819.438.220,00 | 72,47 | 471.299.418,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 395.249.937,00 | 337.642.405,00 | 85,43 | 133.803.406,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.748.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 43.920.000,00 | 37.390.000,00 | 85,13 | 39.260.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 183.358.355,00 | 142.082.140,00 | 77,49 | 146.273.215,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 588.613.969,00 | 410.847.768,00 | 69,80 | 132.091.551,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 73.162.425,00 | 64.531.321,00 | 88,20 | 8.205.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4.595.400,00 | 4.595.400,00 | 100,00 | 5.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 363.559.152,00 | 296.375.418,00 | 81,52 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 6.650.498,00 | 0,00 | 0,00 | 403.831.546,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 543.428.567,00 | 532.198.082,00 | 97,93 | 1.766.199.963,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya | 4.369.871.616,00 | 4.232.136.604,00 | 96,85 | 3.171.411.985,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 4.335.597.875,00 | 3.888.830.700,00 | 89,70 | 1.574.743.581,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 3.800.285,00 | 3.800.000,00 | 99,99 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.253.584.900,00 | 1.923.095.000,00 | 85,33 | 2.361.445.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 57.000.000,00 | 16.000.000,00 | 28,07 | 1.250.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 164.252.250,00 | 137.895.000,00 | 83,95 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.013.340.000,00 | 930.795.000,00 | 91,85 | 720.770.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 28.224.525,00 | 25.427.000,00 | 90,09 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 76.456.800,00 | 70.980.000,00 | 92,84 | 5.375.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 9.113.100,00 | 8.015.000,00 | 87,95 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 340.509.150,00 | 291.300.525,00 | 85,55 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 94.035.362.742,00 | 85.604.506.658,00 | 91,03 | 86.357.819.900,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 33.384.795.366,00 | 27.710.624.133,00 | 83,00 | 28.947.856.310,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.122.030.000,00 | 945.850.000,00 | 84,30 | 585.425.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 912.648.000,00 | 774.338.000,00 | 84,85 | 161.560.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 14.507.500.000,00 | 13.140.300.000,00 | 90,58 | 15.121.851.785,00 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 501.080.000,00 | 152.218.000,00 | 30,38 | 25.904.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 51.509.306,00 | 48.985.145,00 | 95,10 | 228.232.534,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 5.894.400.000,00 | 5.485.200.000,00 | 93,06 | 6.020.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 153.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.560.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 888.600.000,00 | 888.000.000,00 | 99,93 | 828.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 360.000.000,00 | 348.000.000,00 | 96,67 | 376.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 576.000.000,00 | 518.000.000,00 | 89,93 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 193.406.400,00 | 193.406.400,00 | 100,00 | 193.406.400,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 100,00 | 20.698.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 401.300.000,00 | 374.454.202,00 | 93,31 | 287.532.000,00 |

| KodeRekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 575.616.385,00 | 416.921.925,00 | 72,43 | 224.412.252,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 44.500.000,00 | 40.250.000,00 | 90,45 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 198.000.000,00 | 188.616.180,00 | 95,26 | 188.703.318,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 412.468.873,00 | 240.862.250,00 | 58,40 | 142.708.450,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 5.382.334.514,00 | 3.322.647.748,00 | 61,73 | 3.905.140.115,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 80,00 | 2.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 821.777.888,00 | 580.464.683,00 | 70,64 | 545.522.456,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 78.124.000,00 | 11.734.600,00 | 15,02 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0077 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 292.500.000,00 | 23.775.000,00 | 8,13 | 0,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 58.657.587.076,00 | 56.224.626.888,00 | 95,85 | 56.650.269.470,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 | 52.464.283.200,00 | 50.491.649.900,00 | 96,24 | 54.796.621.308,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 | 4.513.488.000,00 | 4.513.488.000,00 | 100,00 | 649.168.800,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.422.099.144,00 | 1.113.355.768,00 | 78,29 | 1.096.250.284,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 70.092.072,00 | 47.170.320,00 | 67,30 | 49.288.377,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 87.624.660,00 | 58.962.900,00 | 67,29 | 58.940.701,00 |
| 5.1.02.02.02.0009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640.000,00 |
| 5.1.02.02.03.0004 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 458.602.300,00 | 350.098.300,00 | 76,34 | 18.101.120,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 434.898.000,00 | 326.500.000,00 | 75,08 | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.187.300,00 | 1.187.300,00 | 100,00 | 4.744.400,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 12.517.000,00 | 12.411.000,00 | 99,15 | 4.356.720,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 61.800.000,00 | 51.200.000,00 | 82,85 | 14.200.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9.400.000,00 | 4.400.000,00 | 46,81 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | 11.200.000,00 | 10.800.000,00 | 96,43 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0037 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.443.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.443.000,00 |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 234.950.000,00 | 213.290.000,00 | 90,78 | 0,00 |
| 5.1.02.02.10.0004 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum | 234.950.000,00 | 213.290.000,00 | 90,78 | 0,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.237.628.000,00 | 1.054.667.337,00 | 85,22 | 583.310.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 598.628.000,00 | 595.378.000,00 | 99,46 | 74.210.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 639.000.000,00 | 459.289.337,00 | 71,88 | 509.100.000,00 |
| 5.1.02.02.15 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.02.15.0005 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 5.343.180.851,00 | 3.525.080.038,00 | 65,97 | 1.297.206.744,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.023.543.800,00 | 892.512.185,00 | 44,11 | 559.985.900,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 123.000.000,00 | 22.916.100,00 | 18,63 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 655.580.000,00 | 397.346.129,00 | 60,61 | 382.017.600,00 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 15.000.000,00 | 14.892.300,00 | 99,28 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 37.500.000,00 | 6.735.686,00 | 17,96 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 10.066.000,00 | 7.235.000,00 | 71,88 | 2.170.735,00 |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 247.229.000,00 | 51.681.500,00 | 20,90 | 87.437.955,00 |
| 5.1.02.03.02.0195 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga | 56.953.500,00 | 11.969.850,00 | 21,02 | 5.511.150,00 |
| 5.1.02.03.02.0232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya | 296.500.000,00 | 97.063.920,00 | 32,74 | 57.816.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0237 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 275.048.000,00 | 144.118.200,00 | 52,40 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 55.500.000,00 | 35.850.000,00 | 64,59 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 135.234.800,00 | 48.178.000,00 | 35,63 | 13.304.535,00 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 114.432.500,00 | 53.525.500,00 | 46,77 | 11.727.925,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.253.337.051,00 | 2.632.567.853,00 | 80,92 | 684.620.844,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 3.149.547.611,00 | 2.529.851.033,00 | 80,32 | 684.620.844,00 |
| 5.1.02.03.03.0063 | Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar | 103.789.440,00 | 102.716.820,00 | 98,97 | 0,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 66.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 66.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.400.408.057,00 | 3.657.448.098,00 | 83,12 | 6.899.039.384,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.400.408.057,00 | 3.657.448.098,00 | 83,12 | 6.899.039.384,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.452.708.057,00 | 2.245.882.348,00 | 91,57 | 888.648.134,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.947.700.000,00 | 1.411.565.750,00 | 72,47 | 5.874.391.250,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000.000,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 187.000.000,00 | 169.000.000,00 | 90,37 | 109.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 187.000.000,00 | 169.000.000,00 | 90,37 | 109.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 187.000.000,00 | 169.000.000,00 | 90,37 | 109.000.000,00 |
| 5.1.02.90 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 16.466.065.294,00 | 11.365.431.533,00 | 69,02 | 0,00 |
| 5.1.02.90.01 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 16.466.065.294,00 | 11.365.431.533,00 | 69,02 | 0,00 |
| 5.1.02.90.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 16.466.065.294,00 | 11.365.431.533,00 | 69,02 | 0,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 101.001.505.544,00 | 95.640.621.113,00 | 94,69 | 81.561.831.276,00 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 101.001.505.544,00 | 95.640.621.113,00 | 94,69 | 81.561.831.276,00 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 101.001.505.544,00 | 95.640.621.113,00 | 94,69 | 81.561.831.276,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 82,80 | 456.618.582,00 |
| 5.1.05.04 | Belanja Hibah kepada BUMD | 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 82,80 | 456.618.582,00 |
| 5.1.05.04.01 | Belanja Hibah Uang kepada BUMD | 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 82,80 | 456.618.582,00 |

| KodeRekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.05.04.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada BUMD | 676.100.000,00 | 559.832.115,00 | 82,80 | 456.618.582,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 376.258.772.497,00 | 347.202.814.954,00 | 92,28 | 298.857.468.222,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 82.922.366.255,47 | 73.630.391.817,00 | 88,79 | 72.499.824.995,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.957.355.816,47 | 53.297.811.166,00 | 90,40 | 63.374.334.977,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 1.443.000,00 | 1.300.000,00 | 90,09 | 272.000.000,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 1.443.000,00 | 1.300.000,00 | 90,09 | 272.000.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 1.443.000,00 | 1.300.000,00 | 90,09 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03.0008 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 4.900.116.140,96 | 4.292.120.000,00 | 87,59 | 1.316.440.000,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 4.900.116.140,96 | 4.292.120.000,00 | 87,59 | 1.316.440.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 495.224.613,00 | 411.900.000,00 | 83,17 | 0,00 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.200.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 73.260.000,00 | 71.220.000,00 | 97,22 | 26.240.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 4.331.631.527,96 | 3.809.000.000,00 | 87,93 | 970.000.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 92.161.020,00 | 91.200.000,00 | 98,96 | 0,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 92.161.020,00 | 91.200.000,00 | 98,96 | 0,00 |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | 92.161.020,00 | 91.200.000,00 | 98,96 | 0,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.980.064.101,00 | 6.503.584.976,00 | 93,17 | 2.877.357.853,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 476.855.096,00 | 439.919.680,00 | 92,25 | 2.649.343.482,00 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 257.689.863,00 | 246.900.000,00 | 95,81 | 4.872.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 219.165.233,00 | 193.019.680,00 | 88,07 | 2.644.471.482,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 6.503.209.005,00 | 6.063.665.296,00 | 93,24 | 228.014.371,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 917.225.865,00 | 782.369.450,00 | 85,30 | 0,00 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 120.970.580,00 | 101.798.000,00 | 84,15 | 600.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 5.097.557.732,00 | 4.900.571.000,00 | 96,14 | 217.949.496,00 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 127.224.586,00 | 118.161.961,00 | 92,88 | 0,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 219.744.332,00 | 145.459.260,00 | 66,19 | 6.343.750,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 20.485.910,00 | 15.305.625,00 | 74,71 | 3.121.125,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 6.273.286.825,00 | 6.069.066.000,00 | 96,74 | 3.585.500.000,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 48.640.200,00 | 37.066.000,00 | 76,20 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 20.512.800,00 | 17.966.000,00 | 87,58 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 28.127.400,00 | 19.100.000,00 | 67,91 | 0,00 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 3.330.000,00 | 3.000.000,00 | 90,09 | 0,00 |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 3.330.000,00 | 3.000.000,00 | 90,09 | 0,00 |
| 5.2.02.06.03 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | 6.221.316.625,00 | 6.029.000.000,00 | 96,91 | 3.585.500.000,00 |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 6.221.316.625,00 | 6.029.000.000,00 | 96,91 | 3.585.500.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 31.065.222.590,51 | 29.764.043.544,00 | 95,81 | 53.857.154.288,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 30.178.231.972,51 | 28.901.267.254,00 | 95,77 | 22.513.573.806,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 7.889.039.385,51 | 7.305.164.872,00 | 92,60 | 6.978.079.559,00 |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | 861.002.025,00 | 835.000.000,00 | 96,98 | 1.255.007.210,00 |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 6.781.795.133,00 | 6.721.270.000,00 | 99,11 | 6.500.000.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 390.819.900,00 | 388.042.000,00 | 99,29 | 3.408.561.072,00 |
| 5.2.02.07.01.0006 | Belanja Modal Alat Kedokteran THT | 5.700.427,00 | 5.700.000,00 | 99,99 | 34.362.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0008 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 1.140.255.603,00 | 1.012.427.282,00 | 88,79 | 551.816.400,00 |
| 5.2.02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak | 5.534.039.638,00 | 5.142.366.000,00 | 92,92 | 3.701.770.165,00 |
| 5.2.02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | 1.575.579.867,00 | 1.492.297.100,00 | 94,71 | 0,00 |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 5.999.999.994,00 | 5.999.000.000,00 | 99,98 | 83.977.400,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 886.990.618,00 | 862.776.290,00 | 97,27 | 31.343.580.482,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 886.990.618,00 | 862.776.290,00 | 97,27 | 31.343.580.482,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.708.518.989,00 | 2.097.030.700,00 | 77,42 | 960.360.936,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 2.578.936.708,00 | 1.988.930.700,00 | 77,12 | 957.986.336,00 |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 2.577.936.708,00 | 1.987.930.700,00 | 77,11 | 957.986.336,00 |
| 5.2.02.08.01.0012 | Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.02.08.04 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 129.582.281,00 | 108.100.000,00 | 83,42 | 2.374.600,00 |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply | 129.582.281,00 | 108.100.000,00 | 83,42 | 2.374.600,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 674.711.734,00 | 612.639.324,00 | 90,80 | 505.521.900,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 572.562.846,00 | 526.876.824,00 | 92,02 | 447.400.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 572.562.846,00 | 526.876.824,00 | 92,02 | 447.400.000,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 102.148.888,00 | 85.762.500,00 | 83,96 | 58.121.900,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 102.148.888,00 | 85.762.500,00 | 83,96 | 58.121.900,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6.259.831.416,00 | 3.864.826.622,00 | 61,74 | 0,00 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6.259.831.416,00 | 3.864.826.622,00 | 61,74 | 0,00 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6.259.831.416,00 | 3.864.826.622,00 | 61,74 | 0,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.877.891.687,00 | 13.420.890.502,00 | 84,53 | 9.079.636.518,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 13.604.937.435,00 | 11.533.232.888,00 | 84,77 | 8.733.226.457,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 13.604.937.435,00 | 11.533.232.888,00 | 84,77 | 8.733.226.457,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 7.489.899.111,00 | 6.464.321.435,00 | 86,31 | 779.841.672,00 |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 853.412.400,00 | 713.629.730,00 | 83,62 | 0,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 3.627.469.542,00 | 3.170.332.588,00 | 87,40 | 7.465.402.589,00 |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 125.361.382,00 | 97.483.000,00 | 77,76 | 0,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 1.429.407.800,00 | 1.017.609.378,00 | 71,19 | 0,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 79.387.200,00 | 69.856.757,00 | 87,99 | 487.982.196,00 |

| KodeRekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 214.585.200,00 | 175.365.532,00 | 81,72 | 346.410.061,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 214.585.200,00 | 175.365.532,00 | 81,72 | 346.410.061,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 214.585.200,00 | 175.365.532,00 | 81,72 | 346.410.061,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.058.369.052,00 | 1.712.292.082,00 | 83,19 | 0,00 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.058.369.052,00 | 1.712.292.082,00 | 83,19 | 0,00 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.058.369.052,00 | 1.712.292.082,00 | 83,19 | 0,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 7.794.078.752,00 | 6.620.190.149,00 | 84,94 | 0,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 181.719.254,00 | 160.460.149,00 | 88,30 | 0,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 181.719.254,00 | 160.460.149,00 | 88,30 | 0,00 |
| 5.2.04.01.01.0009 | Belanja Modal Jalan Khusus | 181.719.254,00 | 160.460.149,00 | 88,30 | 0,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 7.612.359.498,00 | 6.459.730.000,00 | 84,86 | 0,00 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 1.295.592.000,00 | 1.236.000.000,00 | 95,40 | 0,00 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 1.295.592.000,00 | 1.236.000.000,00 | 95,40 | 0,00 |
| 5.2.04.03.02 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 5.501.749.998,00 | 4.850.000.000,00 | 88,15 | 0,00 |
| 5.2.04.03.02.0004 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya | 5.501.749.998,00 | 4.850.000.000,00 | 88,15 | 0,00 |
| 5.2.04.03.09 | Belanja Modal Instalasi Pengaman | 815.017.500,00 | 373.730.000,00 | 45,86 | 0,00 |
| 5.2.04.03.09.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya | 815.017.500,00 | 373.730.000,00 | 45,86 | 0,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 45.853.500,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 45.853.500,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 45.853.500,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 293.040.000,00 | 291.500.000,00 | 99,47 | 0,00 |
| 5.2.06.01.01.0009 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.853.500,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 82.922.366.255,47 | 73.630.391.817,00 | 88,79 | 72.499.824.995,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 459.181.138.752,47 | 420.833.206.771,00 | 91,65 | 371.357.293.217,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (358.920.998.033,47) | (321.685.357.075,66) | 89,63 | (289.405.672.378,92) |

Kab. Tanah Laut, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ISNA FARIDA, M.Kes
NIP. 197406122005012016



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

DINAS KESEHATAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ASET | 742.526.031.057,74 | 695.239.670.040,49 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 39.812.446.228,14 | 66.156.477.027,89 |
| 1.1.01 | Kas dan Setara Kas | 28.111.468.172,65 | 39.477.737.245,75 |
| 1.1.01.04.01.0001 | Kas di BLUD | 26.147.773.211,65 | 39.376.080.136,75 |
| 1.1.06 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 10.218.615.217,00 | 10.219.536.448,00 |
| 1.1.10 | Penyisihan Piutang | 51.017.317,19 | 51.012.711,03 |
| 1.1.12 | Persediaan | 1.431.345.521,30 | 16.408.190.623,11 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 39.812.446.228,14 | 66.156.477.027,89 |
| | | 0,00 | 0 , 00 |
| 1.3 | ASET TETAP | 697.575.218.386,18 | 624.236.326.569,18 |
| 1.3.01 | Tanah | 26.639.789.466,15 | 26.639.789.466,15 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 403.932.962.260,80 | 350.635.151.094,80 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 530.780.361.366,91 | 517.359.470.864,91 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 15.804.552.707,56 | 9.184.362.558,56 |
| 1.3.06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 7.637.000,00 | 7.637.000,00 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (279.590.084.415,24) | (279.590.084.415,24) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 697.575.218.386,18 | 624.236.326.569,18 |
| | | 0,00 | 0 , 00 |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 5.138.366.443,42 | 4.846.866.443,42 |
| 1.5.03 | Aset Tidak Berwujud | 541.539.000,00 | 250.039.000,00 |
| 1.5.04 | Aset Lain-lain | 5.951.636.864,58 | 5.951.636.864,58 |
| 1.5.05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (221.732.210,52) | (221.732.210,52) |
| 1.5.06 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (1.133.077.210,64) | (1.133.077.210,64) |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 5.138.366.443,42 | 4.846.866.443,42 |
| | JUMLAH ASET | 742.526.031.057,74 | 695.239.670.040,49 |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 0,00 | 0 , 00 |
| 2 | KEWAJIBAN | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |
| 2.1.06 | Utang Belanja | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 5.687.575.332,67 | 7.986.630.592,00 |
| | | 0,00 | 0 , 00 |
| 3 | EKUITAS | 519.771.668.220,48 | 480.219.449.135,16 |
| 3.1 | EKUITAS | 519.771.668.220,48 | 480.219.449.135,16 |
| 3.1.01.02 | Surplus/Defisit-LO | (261.087.065.571,39) | (218.911.817.186,01) |
| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 |
| 3.1.03 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 299.685.015.345,00 | 0 , 00 |
| | JUMLAH EKUITAS | 519.771.668.220,48 | 480.219.449.135,16 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 525.459.243.553,15 | 488.206.079.727,16 |

Kab. Tanah Laut, 30-01-2025
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ISNA FARIDA, M.Kes
NIP. 197406122005012016

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| 7 | PENDAPATAN | 98.924.110.351,93 | 88.433.029.990,68 | 10.491.080.361,25 | 11,86 |
| 7.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 98.924.110.351,93 | 88.433.029.990,68 | 10.491.080.361,25 | 11,86 |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO | 79.358.588.559,78 | 166.500.000,00 | 79.192.088.559,78 | 47,562,82 |
| 7.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum-LO | 79.115.833.646,00 | 0,00 | 79.115.833.646,00 | 100,00 |
| 7.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO | 79.115.833.646,00 | 0,00 | 79.115.833.646,00 | 100,00 |
| 7.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO | 1.930.714.248,00 | 0,00 | 1.930.714.248,00 | 100,00 |
| 7.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO | 77.185.119.398,00 | 0,00 | 77.185.119.398,00 | 100,00 |
| 7.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha-LO | 242.754.913,78 | 166.500.000,00 | 76.254.913,78 | 45,80 |
| 7.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 242.754.913,78 | 166.500.000,00 | 76.254.913,78 | 45,80 |
| 7.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 85.316.000,00 | 0,00 | 85.316.000,00 | 100,00 |
| 7.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 148.750.000,00 | 165.000.000,00 | (16.250.000,00) | (9,85) |
| 7.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO | 2.388.913,78 | 0,00 | 2.388.913,78 | 100,00 |
| 7.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan-LO | 6.300.000,00 | 1.500.000,00 | 4.800.000,00 | 320,00 |
| 7.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 19.565.521.792,15 | 88.266.529.990,68 | (68.701.008.198,53) | (77,83) |
| 7.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian-LO | 328.500,00 | 0,00 | 328.500,00 | 100,00 |
| 7.1.04.15.99 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO | 328.500,00 | 0,00 | 328.500,00 | 100,00 |
| 7.1.04.15.99.0002 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD-LO | 328.500,00 | 0,00 | 328.500,00 | 100,00 |
| 7.1.04.16 | Pendapatan dari BLUD-LO | 19.565.193.292,15 | 88.266.529.990,68 | (68.701.336.698,53) | (77,83) |
| 7.1.04.16.01 | Pendapatan dari BLUD-LO | 89.336.258,00 | 6.484.777.407,66 | (6.395.441.149,66) | (98,62) |
| 7.1.04.16.01.0001 | Pendapatan dari BLUD-LO | 89.336.258,00 | 6.484.777.407,66 | (6.395.441.149,66) | (98,62) |
| 7.1.04.16.02 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO | 18.412.146.078,74 | 80.033.614.581,95 | (61.621.468.503,21) | (76,99) |
| 7.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO | 18.412.146.078,74 | 80.033.614.581,95 | (61.621.468.503,21) | (76,99) |
| 7.1.04.16.04 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO | 199.082.357,15 | 519.300.826,40 | (320.218.469,25) | (61,66) |
| 7.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO | 199.082.357,15 | 519.300.826,40 | (320.218.469,25) | (61,66) |
| 7.1.04.16.06 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO | 864.628.598,26 | 1.228.837.174,67 | (364.208.576,41) | (29,64) |
| 7.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO | 864.628.598,26 | 212.551.324,36 | 652.077.273,90 | 306,79 |
| 7.1.04.16.06.0002 | Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO | 0,00 | 1.016.285.850,31 | (1.016.285.850,31) | (100,00) |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 98.924.110.351,93 | 88.433.029.990,68 | 10.491.080.361,25 | 11,86 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 98.924.110.351,93 | 88.433.029.990,68 | 10.491.080.361,25 | 11,86 |
| 8 | BEBAN | 360.011.175.923,32 | 307.344.847.176,69 | 52.666.328.746,63 | 17,14 |
| 8.1 | BEBAN OPERASI | 360.011.175.923,32 | 307.295.662.471,93 | 52.715.513.451,39 | 17,15 |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 126.418.953.134,00 | 112.633.594.756,00 | 13.785.358.378,00 | 12,24 |
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 72.536.052.828,00 | 64.107.245.299,00 | 8.428.807.529,00 | 13,15 |
| 8.1.01.01.01 | Beban Gaji Pokok ASN | 51.650.647.358,00 | 45.995.907.324,00 | 5.654.740.034,00 | 12,29 |
| 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS | 47.784.208.406,00 | 44.333.960.324,00 | 3.450.248.082,00 | 7,78 |
| 8.1.01.01.01.0002 | Beban Gaji Pokok PPPK | 3.866.438.952,00 | 1.661.947.000,00 | 2.204.491.952,00 | 132,65 |
| 8.1.01.01.02 | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 4.078.586.322,00 | 3.587.161.248,00 | 491.425.074,00 | 13,70 |
| 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 3.787.857.426,00 | 3.474.543.968,00 | 313.313.458,00 | 9,02 |
| 8.1.01.01.02.0002 | Beban Tunjangan Keluarga PPPK | 290.728.896,00 | 112.617.280,00 | 178.111.616,00 | 158,16 |
| 8.1.01.01.03 | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 328.090.000,00 | 327.325.000,00 | 765.000,00 | 0,23 |
| 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 328.090.000,00 | 327.325.000,00 | 765.000,00 | 0,23 |
| 8.1.01.01.04 | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 5.528.980.000,00 | 5.230.229.000,00 | 298.751.000,00 | 5,71 |
| 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS | 5.205.500.000,00 | 5.073.679.000,00 | 131.821.000,00 | 2,60 |
| 8.1.01.01.04.0002 | Beban Tunjangan Fungsional PPPK | 323.480.000,00 | 156.550.000,00 | 166.930.000,00 | 106,63 |

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 8.1.01.01.05 | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 204.365.000,00 | 317.580.000,00 | (113.215.000,00) | (35,65) |
| 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 185.775.000,00 | 312.180.000,00 | (126.405.000,00) | (40,49) |
| 8.1.01.01.05.0002 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 18.590.000,00 | 5.400.000,00 | 13.190.000,00 | 244,26 |
| 8.1.01.01.06 | Beban Tunjangan Beras ASN | 2.598.429.600,00 | 2.501.966.160,00 | 96.463.440,00 | 3,86 |
| 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS | 2.382.980.100,00 | 2.411.006.640,00 | (28.026.540,00) | (1,16) |
| 8.1.01.01.06.0002 | Beban Tunjangan Beras PPPK | 215.449.500,00 | 90.959.520,00 | 124.489.980,00 | 136,86 |
| 8.1.01.01.07 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.871.042.498,00 | 2.125.755.146,00 | 1.745.287.352,00 | 82,10 |
| 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.871.042.498,00 | 2.104.865.042,00 | 1.766.177.456,00 | 83,91 |
| 8.1.01.01.07.0002 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 0,00 | 20.890.104,00 | (20.890.104,00) | (100,00) |
| 8.1.01.01.08 | Beban Pembulatan Gaji ASN | 815.396,00 | 722.847,00 | 92.549,00 | 12,80 |
| 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 736.305,00 | 685.779,00 | 50.526,00 | 7,37 |
| 8.1.01.01.08.0002 | Beban Pembulatan Gaji PPPK | 79.091,00 | 37.068,00 | 42.023,00 | 113,37 |
| 8.1.01.01.09 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 3.849.166.897,00 | 3.641.544.491,00 | 207.622.406,00 | 5,70 |
| 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 3.593.526.970,00 | 3.500.000.000,00 | 93.526.970,00 | 2,67 |
| 8.1.01.01.09.0002 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 255.639.927,00 | 141.544.491,00 | 114.095.436,00 | 80,61 |
| 8.1.01.01.10 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 106.481.711,00 | 94.763.097,00 | 11.718.614,00 | 12,37 |
| 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 98.377.916,00 | 91.173.240,00 | 7.204.676,00 | 7,90 |
| 8.1.01.01.10.0002 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 8.103.795,00 | 3.589.857,00 | 4.513.938,00 | 125,74 |
| 8.1.01.01.11 | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 319.448.046,00 | 284.290.986,00 | 35.157.060,00 | 12,37 |
| 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 295.136.778,00 | 273.521.451,00 | 21.615.327,00 | 7,90 |
| 8.1.01.01.11.0002 | Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK | 24.311.268,00 | 10.769.535,00 | 13.541.733,00 | 125,74 |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 45.467.255.230,00 | 42.277.449.457,00 | 3.189.805.773,00 | 7,54 |
| 8.1.01.02.01 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 31.905.675.806,00 | 29.998.704.691,00 | 1.906.971.115,00 | 6,36 |
| 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 29.752.955.048,00 | 29.312.433.576,00 | 440.521.472,00 | 1,50 |
| 8.1.01.02.01.0002 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 2.152.720.758,00 | 686.271.115,00 | 1.466.449.643,00 | 213,68 |
| 8.1.01.02.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 10.514.195.114,00 | 9.530.368.059,00 | 983.827.055,00 | 10,32 |
| 8.1.01.02.03.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 9.761.176.979,00 | 9.061.392.891,00 | 699.784.088,00 | 7,72 |
| 8.1.01.02.03.0002 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | 753.018.135,00 | 468.975.168,00 | 284.042.967,00 | 60,57 |
| 8.1.01.02.04 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 3.047.384.310,00 | 2.748.376.707,00 | 299.007.603,00 | 10,88 |
| 8.1.01.02.04.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 2.910.998.714,00 | 2.576.326.817,00 | 334.671.897,00 | 12,99 |
| 8.1.01.02.04.0002 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK | 136.385.596,00 | 172.049.890,00 | (35.664.294,00) | (20,73) |
| 8.1.01.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 941.035.076,00 | 0,00 | 941.035.076,00 | 100,00 |
| 8.1.01.03.02 | Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 5.415.000,00 | 0,00 | 5.415.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.03.02.0014 | Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah | 5.415.000,00 | 0,00 | 5.415.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.03.06 | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 935.620.076,00 | 0,00 | 935.620.076,00 | 100,00 |
| 8.1.01.03.06.0001 | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 935.620.076,00 | 0,00 | 935.620.076,00 | 100,00 |
| 8.1.01.05 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.05.11 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.05.11.0014 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.99 | Beban Pegawai BLUD | 7.472.900.000,00 | 6.248.900.000,00 | 1.224.000.000,00 | 19,59 |
| 8.1.01.99.99 | Beban Pegawai BLUD | 7.472.900.000,00 | 6.248.900.000,00 | 1.224.000.000,00 | 19,59 |
| 8.1.01.99.99.9999 | Beban Pegawai BLUD | 7.472.900.000,00 | 6.248.900.000,00 | 1.224.000.000,00 | 19,59 |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 233.032.395.280,48 | 194.241.164.165,83 | 38.791.231.114,65 | 19,97 |
| 8.1.02.01 | Beban Barang | 35.238.787.366,81 | 13.216.854.897,33 | 22.021.932.469,48 | 166,62 |
| 8.1.02.01.01 | Beban Barang Pakai Habis | 35.238.787.366,81 | 13.216.854.897,33 | 22.021.932.469,48 | 166,62 |
| 8.1.02.01.01.0001 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 46.381.271,00 | 0,00 | 46.381.271,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0002 | Beban Bahan-Bahan Kimia | 1.963.697.214,27 | 46.702.757,73 | 1.916.994.456,54 | 4.104,67 |
| 8.1.02.01.01.0004 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 271.579.199,00 | 223.732.350,00 | 47.846.849,00 | 21,39 |
| 8.1.02.01.01.0009 | Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3.045.000,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0010 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 0,00 | 1.950.000,00 | (1.950.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.01.01.0012 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 10.265.173.118,43 | 3.218.659.510,21 | 7.046.513.608,22 | 218,93 |
| 8.1.02.01.01.0023 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 0,00 | 340.000,00 | (340.000,00) | (100,00) |

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.232.834.854,00 | 299.504.664,86 | 1.933.330.189,14 | 645,51 |
| 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 478.994.750,00 | 69.837.194,50 | 409.157.555,50 | 585,87 |
| 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 0,00 | 39.748.000,00 | (39.748.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.01.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 35.360.000,00 | 35.960.000,00 | (600.000,00) | (1,67) |
| 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 223.756.503,00 | 138.623.960,00 | 85.132.543,00 | 61,41 |
| 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 639.573.946,00 | 246.307.512,00 | 393.266.434,00 | 159,66 |
| 8.1.02.01.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 100.449.251,00 | 345.105,00 | 100.104.146,00 | 29.006,87 |
| 8.1.02.01.01.0032 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4.595.400,00 | 5.500.000,00 | (904.600,00) | (16,45) |
| 8.1.02.01.01.0034 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga | 0,00 | 2.520.000,00 | (2.520.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 296.375.418,00 | 0,00 | 296.375.418,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0036 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 13.037.000,00 | 607.731.047,00 | (594.694.047,00) | (97,85) |
| 8.1.02.01.01.0037 | Beban Obat-Obatan-Obat | 7.779.550.138,15 | 3.303.054.050,03 | 4.476.496.088,12 | 135,53 |
| 8.1.02.01.01.0038 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3.583.588.758,96 | 317.411.985,00 | 3.266.176.773,96 | 1.029,00 |
| 8.1.02.01.01.0039 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 3.888.830.700,00 | 1.574.743.581,00 | 2.314.087.119,00 | 146,95 |
| 8.1.02.01.01.0040 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0043 | Beban Natura dan Pakan-Natura | 4.657.320,00 | (4.657.320,00) | 9.314.640,00 | (200,00) |
| 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 1.923.095.000,00 | 2.361.445.000,00 | (438.350.000,00) | (18,56) |
| 8.1.02.01.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 16.000.000,00 | 1.250.000,00 | 14.750.000,00 | 1.180,00 |
| 8.1.02.01.01.0054 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 137.895.000,00 | 0,00 | 137.895.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0058 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 930.795.000,00 | 720.770.500,00 | 210.024.500,00 | 29,14 |
| 8.1.02.01.01.0063 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 25.427.000,00 | 0,00 | 25.427.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0064 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 70.980.000,00 | 5.375.000,00 | 65.605.000,00 | 1.220,56 |
| 8.1.02.01.01.0075 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 8.015.000,00 | 0,00 | 8.015.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0076 | Beban Pakaian Olahraga | 291.300.525,00 | 0,00 | 291.300.525,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02 | Beban Jasa | 84.676.594.825,00 | 87.047.021.976,00 | (2.370.427.151,00) | (2,72) |
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor | 27.465.046.700,00 | 28.954.723.986,00 | (1.489.677.286,00) | (5,14) |
| 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 945.850.000,00 | 585.425.000,00 | 360.425.000,00 | 61,57 |
| 8.1.02.02.01.0004 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 774.338.000,00 | 161.560.000,00 | 612.778.000,00 | 379,29 |
| 8.1.02.02.01.0005 | Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 0,00 | 2.000.000,00 | (2.000.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.01.0014 | Beban Jasa Tenaga Kesehatan | 13.140.300.000,00 | 15.121.851.785,00 | (1.981.551.785,00) | (13,10) |
| 8.1.02.02.01.0015 | Beban Jasa Tenaga Laboratorium | 152.218.000,00 | 25.904.000,00 | 126.314.000,00 | 487,62 |
| 8.1.02.02.01.0016 | Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 48.985.145,00 | 228.232.534,00 | (179.247.389,00) | (78,54) |
| 8.1.02.02.01.0026 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 5.485.200.000,00 | 6.020.200.000,00 | (535.000.000,00) | (8,89) |
| 8.1.02.02.01.0029 | Beban Jasa Tenaga Ahli | 0,00 | 87.560.000,00 | (87.560.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 888.000.000,00 | 828.400.000,00 | 59.600.000,00 | 7,19 |
| 8.1.02.02.01.0031 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 348.000.000,00 | 376.200.000,00 | (28.200.000,00) | (7,50) |
| 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir | 518.000.000,00 | 0,00 | 518.000.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0036 | Beban Jasa Audit/Surveilliance ISO | 193.406.400,00 | 193.406.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.02.02.01.0047 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | 14.200.000,00 | 20.698.000,00 | (6.498.000,00) | (31,39) |
| 8.1.02.02.01.0050 | Beban Jasa Kalibrasi | 374.454.202,00 | 287.532.000,00 | 86.922.202,00 | 30,23 |
| 8.1.02.02.01.0051 | Beban Jasa Pengolahan Sampah | 416.921.925,00 | 224.412.252,00 | 192.509.673,00 | 85,78 |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 40.250.000,00 | 0,00 | 40.250.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0059 | Beban Tagihan Telepon | 161.236.767,00 | 194.427.094,00 | (33.190.327,00) | (17,07) |
| 8.1.02.02.01.0060 | Beban Tagihan Air | 238.674.150,00 | 103.092.750,00 | 135.581.400,00 | 131,51 |
| 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik | 3.106.637.828,00 | 3.945.899.715,00 | (839.261.887,00) | (21,27) |
| 8.1.02.02.01.0062 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 580.464.683,00 | 545.522.456,00 | 34.942.227,00 | 6,41 |
| 8.1.02.02.01.0064 | Beban Paket/Pengiriman | 11.734.600,00 | 0,00 | 11.734.600,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0077 | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 23.775.000,00 | 0,00 | 23.775.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 55.542.292.488,00 | 57.332.603.870,00 | (1.790.311.382,00) | (3,12) |
| 8.1.02.02.02.0003 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 | 50.491.649.900,00 | 54.796.621.308,00 | (4.304.971.408,00) | (7,86) |

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 8.1.02.02.02.0004 | Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 3.831.153.600,00 | 1.331.503.200,00 | 2.499.650.400,00 | 187,73 |
| 8.1.02.02.02.0005 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.113.355.768,00 | 1.096.250.284,00 | 17.105.484,00 | 1,56 |
| 8.1.02.02.02.0006 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 47.170.320,00 | 49.288.377,00 | (2.118.057,00) | (4,30) |
| 8.1.02.02.02.0007 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 58.962.900,00 | 58.940.701,00 | 22.199,00 | 0,04 |
| 8.1.02.02.03 | Beban Sewa Tanah | 0,00 | 35.640.000,00 | (35.640.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.03.0004 | Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 0,00 | 35.640.000,00 | (35.640.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.04 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 350.098.300,00 | 18.101.120,00 | 331.997.180,00 | 1.834,13 |
| 8.1.02.02.04.0036 | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 326.500.000,00 | 4.000.000,00 | 322.500.000,00 | 8.062,50 |
| 8.1.02.02.04.0117 | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.187.300,00 | 4.744.400,00 | (3.557.100,00) | (74,97) |
| 8.1.02.02.04.0118 | Beban Sewa Mebel | 12.411.000,00 | 4.356.720,00 | 8.054.280,00 | 184,87 |
| 8.1.02.02.04.0132 | Beban Sewa Peralatan Studio Audio | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.05 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 51.200.000,00 | 14.200.000,00 | 37.000.000,00 | 260,56 |
| 8.1.02.02.05.0009 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.05.0025 | Beban Sewa Bangunan Terbuka | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.05.0030 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0,00 | 14.200.000,00 | (14.200.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.05.0041 | Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.08 | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 9.000.000,00 | (9.000.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.08.0005 | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software | 0,00 | 9.000.000,00 | (9.000.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.10 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0,00 | 99.443.000,00 | (99.443.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.10.0008 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan | 0,00 | 99.443.000,00 | (99.443.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.11 | Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 213.290.000,00 | 0,00 | 213.290.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.11.0004 | Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum | 213.290.000,00 | 0,00 | 213.290.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.13 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.054.667.337,00 | 583.310.000,00 | 471.357.337,00 | 80,81 |
| 8.1.02.02.13.0001 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 595.378.000,00 | 74.210.000,00 | 521.168.000,00 | 702,29 |
| 8.1.02.02.13.0003 | Beban Bimbingan Teknis | 459.289.337,00 | 509.100.000,00 | (49.810.663,00) | (9,78) |
| 8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | 3.525.080.038,00 | 1.297.206.744,00 | 2.227.873.294,00 | 171,74 |
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 892.512.185,00 | 559.985.900,00 | 332.526.285,00 | 59,38 |
| 8.1.02.03.02.0035 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 22.916.100,00 | 0,00 | 22.916.100,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 397.346.129,00 | 382.017.600,00 | 15.328.529,00 | 4,01 |
| 8.1.02.03.02.0037 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 14.892.300,00 | 0,00 | 14.892.300,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0038 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 6.735.686,00 | 0,00 | 6.735.686,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0117 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 7.235.000,00 | 2.170.735,00 | 5.064.265,00 | 233,30 |
| 8.1.02.03.02.0120 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0121 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 51.681.500,00 | 87.437.955,00 | (35.756.455,00) | (40,89) |
| 8.1.02.03.02.0195 | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga | 11.969.850,00 | 5.511.150,00 | 6.458.700,00 | 117,19 |
| 8.1.02.03.02.0232 | Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya | 97.063.920,00 | 57.816.000,00 | 39.247.920,00 | 67,88 |
| 8.1.02.03.02.0237 | Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 144.118.200,00 | 0,00 | 144.118.200,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0404 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 35.850.000,00 | 0,00 | 35.850.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 48.178.000,00 | 13.304.535,00 | 34.873.465,00 | 262,12 |
| 8.1.02.03.02.0409 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 53.525.500,00 | 11.727.925,00 | 41.797.575,00 | 356,39 |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.632.567.853,00 | 684.620.844,00 | 1.947.947.009,00 | 284,53 |
| 8.1.02.03.03.0001 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 2.529.851.033,00 | 684.620.844,00 | 1.845.230.189,00 | 269,53 |
| 8.1.02.03.03.0063 | Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar | 102.716.820,00 | 0,00 | 102.716.820,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.04 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 52.600.000,00 | (52.600.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.03.04.0126 | Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 0,00 | 52.600.000,00 | (52.600.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.04 | Beban Perjalanan Dinas | 3.657.448.098,00 | 6.899.039.384,00 | (3.241.591.286,00) | (46,99) |

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 8.1.02.04.01 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3.657.448.098,00 | 6.899.039.384,00 | (3.241.591.286,00) | (46,99) |
| 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 2.245.882.348,00 | 888.648.134,00 | 1.357.234.214,00 | 152,73 |
| 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.411.565.750,00 | 5.874.391.250,00 | (4.462.825.500,00) | (75,97) |
| 8.1.02.04.01.0005 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0,00 | 136.000.000,00 | (136.000.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.05 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 169.000.000,00 | 109.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,05 |
| 8.1.02.05.01 | Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 169.000.000,00 | 109.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,05 |
| 8.1.02.05.01.0001 | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 169.000.000,00 | 109.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55,05 |
| 8.1.02.90 | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 11.365.431.533,00 | 0,00 | 11.365.431.533,00 | 100,00 |
| 8.1.02.90.01 | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 11.365.431.533,00 | 0,00 | 11.365.431.533,00 | 100,00 |
| 8.1.02.90.01.0001 | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 11.365.431.533,00 | 0,00 | 11.365.431.533,00 | 100,00 |
| 8.1.02.99 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 94.400.053.419,67 | 85.672.041.164,50 | 8.728.012.255,17 | 10,19 |
| 8.1.02.99.99 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 94.400.053.419,67 | 85.672.041.164,50 | 8.728.012.255,17 | 10,19 |
| 8.1.02.99.99.9999 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 94.400.053.419,67 | 85.672.041.164,50 | 8.728.012.255,17 | 10,19 |
| 8.1.05 | Beban Hibah | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |
| 8.1.05.04 | Beban Hibah Uang kepada BUMD | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |
| 8.1.05.04.01 | Beban Hibah Uang kepada BUMD | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |
| 8.1.05.04.01.0001 | Beban Hibah Uang kepada BUMD | 559.832.115,00 | 456.618.582,00 | 103.213.533,00 | 22,60 |
| 8.1.07 | Beban Penyisihan Piutang | (4.606,16) | (35.715.031,90) | 35.710.425,74 | (99,99) |
| 8.1.07.04 | Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | (4.606,16) | (35.715.031,90) | 35.710.425,74 | (99,99) |
| 8.1.07.04.16 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | (4.606,16) | (35.715.031,90) | 35.710.425,74 | (99,99) |
| 8.1.07.04.16.0001 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | 0,00 | (35.715.031,90) | 35.715.031,90 | (100,00) |
| 8.1.07.04.16.0002 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | (4.606,16) | 0,00 | (4.606,16) | 0,00 |
| | JUMLAH BEBAN OPERASI | 360.011.175.923,32 | 307.295.662.471,93 | 52.715.513.451,39 | 17,15 |
| | | | | | |
| 8.1.08 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |
| 8.1.08.06 | Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |
| 8.1.08.06.01 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |
| 8.1.08.06.01.0004 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |
| | JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 0,00 | 49.184.704,76 | (49.184.704,76) | (100,00) |
| | JUMLAH BEBAN | 360.011.175.923,32 | 307.344.847.176,69 | 52.666.328.746,63 | 17,14 |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT-LO | (261.087.065.571,39) | (218.911.817.186,01) | (42.175.248.385,38) | 19,27 |

Kab. Tanah Laut, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ISNA FARIDA, M.Kes
NIP.197406122005012016



PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| EKUITAS AWAL | 480.219.449.135,16 | 699.127.986.921,17 |
| SURPLUS / (DEFISIT) - LO | (260.493.427.132,39) | (218.911.817.186,01) |
| RK PPKD | 299.685.015.345,00 | 0,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0,00 | 0,00 |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN | 954.269.311,71 | 3.279.400,00 |
| EKUITAS AKHIR | 520.365.306.659,48 | 480.219.449.135,16 |

Kab. Tanah Laut, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ISNA FARIDA, M.Kes
NIP. 197406122005012016